



**.gov**

# POTRET BURAM PEMERINTAHAN

Politik Birokrasi, Pelayanan Publik,  
Inovasi dan Konflik

PENGANTAR

Dr. Herman Oesman, M.Si

EDITOR

Syarifuddin Usman - Rasid Pora

# audit manag passwords govern practices report

staff focus  
order specific  
privacy industry analysis  
general complete requirements problem  
actually

assets technical reasonable  
metrics activities discovered check asked  
procedures practices follow



☎ 0858 5343 1992  
✉ eurekaediaaksara@gmail.com  
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10  
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-487-341-2



9 786234 873412

**POTRET BURAM PEMERINTAHAN**  
**POLITIK BIROKRASI, PELAYANAN PUBLIK,**  
**INOVASI DAN KONFLIK**

Abdul Halil H. Ibrahim  
Abdullah Kaunar  
Ali Lating  
Bakri La Suhu  
Iksan R.A Arsad  
Rasid Pora  
Rahmat Suaib  
Sahrul Pora  
Syarifuddin Usman  
Vivi Noviyanti



**PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA**

**POTRET BURAM PEMERINTAHAN  
POLITIK BIROKRASI, PELAYANAN PUBLIK,  
INOVASI DAN KONFLIK**

**Penulis** : Abdul Halil H. Ibrahim, Abdullah Kaunar,  
Ali Lating, Bakri La Suhu, Iksan R.A Arsad,  
Rasid Pora, Rahmat Suaib, Sahrul Pora,  
Syarifuddin Usman, Vivi Noviyanti

**Editor** : Syarifuddin Usman, Rasid Pora

**Desain Sampul** : Eri Setiawan

**Tata Letak** : Endar Widi Sugiyo

**ISBN** : 978-623-487-341-2

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, NOVEMBER 2022**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi:**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat kepada teman-teman dosen yang menerbitkan risalah book chapter ini sebagai bagian dari kerja-kerja intelektual dan juga kerja-kerja dosen; selain mengajar, mengabdikan dan meneliti juga menerbitkan publikasi, baik dalam bentuk jurnal, maupun buku.

Dan saya mengapresiasi teman-teman dosen program studi ilmu pemerintahan telah memulainya dengan membuat program dosen ilmu pemerintahan menulis dan buku ini adalah salah satu hasilnya.

Akhirnya selamat atas penerbitan buku ini, semoga karya ini tak berhenti disini, dan semoga bisa menjadi bahan lecutan bagi dosen-dosen yang lain.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rektor

Prof. Dr. Saiful Deni, M.Si.

## PENGANTAR

Dr. Herman Oesman, M.Si.  
Sosiolog/Dosen Sosiologi FISIP UMMU

### ENDEMIK POLITIK DALAM TUBUH BIROKRASI LOKAL

"Birokrat kita mudah terombang-ambing oleh tarikan kepentingan, dan senang bermain dalam kolam-kolam politik..."

Seandainya birokrasi tak berada dalam sangkar besi (*iron cage*) sebagaimana amsal yang dibuat Max Weber (1864-1920), barangkali kita agak kesulitan menyaksikan para aparatus birokrasi sibuk membenahi struktur otoritasnya dengan segala kerumitan-kerumitan di dalamnya. Pasalnya, aparatus birokrasi kemungkinan akan ramai dan marak di partai politik, menguatkan posisi tawarnya berebut kekuasaan politik semata.

Namun realitas berkata lain. Aparatus birokrasi dikungkung dan dipenjara dalam "sangkar besi" perundang-undangan, aturan-aturan, serta kebijakan-kebijakan rumit yang membatasi ruang gerak aparatus birokrasi untuk tidak berpolitik praktis. Bahkan sangat profesional dengan tugas dan perannya sebagai pelayan publik.

Seorang birokrat yang bekerja, juga dituntut untuk lebih mengikuti prinsip-prinsip hierarki. Sekalipun itu urusan pribadi, seorang birokrat harus lebih menghormati kualifikasi-kualifikasi yang sudah diatur secara formal. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan Max Weber : "*sine ira et studio*," formal dan tidak bersifat pribadi.

Potret birokrasi di Indonesia, umumnya didominasi persoalan-persoalan yang bersinggungan dengan politik. Birokrasi pun menenun kekisruhan, memanen kegaduhan yang ujungnya birokrasi terjebak pada pusaran balas dendam. Dalam kekisruhan dan kegaduhan itulah, aparatus birokrasi bergerak dengan amat hati-hati dan terbatas, karena dikerangkeng dengan struktur. Yang tak bisa dipungkiri, birokrasi juga merupakan sumber daya terbesar dalam meraup kepentingan politik. Tak jarang birokrasi dirisak dalam pelbagai proses politik, terlebih elit politik lokal. Tubuh pemerintahan pun ditelingkah dengan hal-hal tak rasional.

Pertanyaan yang kerap mengemuka pasca proses politik, terutama pada beberapa wilayah (di Maluku Utara), berapa jumlah PNS yang akan pindah ke kabupaten/kota lain, setelah dengan diam-diam kandidat yang “didukung” tidak lolos dalam pertarungan politik. Atau bagaimana menjaga soliditas PNS agar tetap bekerja mengelola pemerintahan dan pelayanan publik secara lebih maksimal, tanpa merasa diawasi atau diintimidasi sehingga kenyamanan bekerja seolah “tidak dipaksa” untuk patuh sesuai “perintah” hanya karena pilihan politik yang berbeda, sering menjadi pembicaraan yang kerap terlupakan.

Memang, pasca proses politik, terutama di kabupaten/kota se-Maluku Utara biasanya terjadi perpindahan besar-besaran sejumlah aparatur birokrasi ke daerah yang dirasa nyaman dan aman dengan pimpinan yang lebih mengayomi, peduli, dan dapat “memberinya” status baru sehingga tidak dilempar atau ditempatkan pada daerah “buangan.” Ini bukan rahasia umum, dan kenyataan dalam tubuh birokrasi lokal demikian adanya.

Netralitas PNS/ASN dalam proses politik boleh jadi hanyalah wacana semata. Namun, pada lapis bawah, keberpihakan terhadap salah satu kandidat yang berkompetisi justru bergerak secara laten dan masif. Entah bagaimana pola pergerakan itu bermain, yang jelas, secara kasat mata hal itu jarang terendus.

### **Birokrasi Berbaju Politik**

Sejarah birokrasi Maluku Utara dalam catatan, selalu sarat dengan persinggungan politik. Akibatnya, berharap kinerja pemerintahan lebih baik, seakan jauh panggang dari api. Berharap hadirnya aparat birokrasi potensial dan andal untuk bekerja maksimal, selalu tertutupi dengan pergantian, mutasi, atau penempatan orang-orang dengan kapasitas, kompetensi, dan kredibilitas diragukan. Jadilah kemudian kinerja pemerintahan daerah diurus oleh orang-orang yang nota bene didominasi mereka yang dekat pada elit pemegang kekuasaan, bukan mempertimbangkan berdasarkan merit system. Pola ini sudah harus dihentikan, karena hanya akan merugikan wajah birokrasi dan tentu rasa kepercayaan publik kepada pemerintah menjadi tereduksi dan makin menipis.

Setiap pergantian tampuk pemerintahan, persoalan sirkulasi elit di tubuh birokrasi, terutama di tingkat SKPD/OPD tidak pernah berjalan normal. Selalu saja dirisak oleh politik balas dendam. Kasak kusuk penggusuran dan pergeseran begitu riuh di mana-mana. Mereka yang menempati posisi penting dan telah menunjukkan kinerjanya dengan baik, acap kali harus rela digantikan mereka yang mungkin saja belum mampu bekerja dan memiliki pengalaman. Di sinilah kemudian, program-program yang diharapkan dapat mencapai target pada akhirnya tidak maksimal dijalankan. Mereka yang termarjinalkan secara tidak langsung harus mencari lingkungan yang lebih bisa menerimanya.

Alhasil, dalam perkembangan birokrasi di Maluku Utara, publik tidak pernah tahu berapa presentase capaian yang sudah dilakukan dalam melayani kepentingan publik, dan berapa presentase kegagalan program itu. Hal ini karena setiap SKPD/OPD tidak pernah memiliki progress report yang harus disampaikan ke publik. "Keberhasilan" setiap program hanya disampaikan secara tertutup melalui para elit. Publik hanyalah obyek dari kebijakan yang dilakukan secara sepihak, bukan menjadi subyek yang merasakan manfaat kebijakan yang ada.

Persoalan-persoalan sosial budaya yang mengiringi perjalanan suatu pembangunan daerah di Maluku Utara begitu panjang berderet, dan tidak pernah elit mau mencicilnya. Berapa presentase pemenuhan kebutuhan air bersih, sanitasi, dan kesehatan yang dirasakan langsung masyarakat selama ini? Sudah sampai di mana ketersediaan infrastruktur dasar, mulai pelabuhan, jembatan, dan jalan yang dapat diakses masyarakat Maluku Utara secara baik? Belum lagi persoalan stunting, kekerasan pada perempuan dan anak, perkawinan usia dini, dan sebagainya mengiringi persoalan pemerintahan lokal di Maluku Utara.

Kiranya, setiap pergantian elit, persoalan mendasar yang dialami masyarakat akan tidak pernah surut. Sementara di tubuh pemerintahan, kepentingan politik untuk perebutan kekuasaan demikian kencang terasa, dan senyap pada persoalan-persoalan mendasar.

Politik balas dendam karena pilihan yang berbeda sudah harus dibuang jauh-jauh. Yang harus dijaga adalah keberlanjutan ritme roda pemerintahan yang mampu memberi jawaban atas semua persoalan mendasar yang dialami masyarakat selama ini. Daerah ini sudah lama terpuruk akibat keegoan, kepicikan, dan kesombongan elit secara struktural dalam pemerintahan.

Proses politik dan demokrasi yang setiap periode digelar, selain terjadi rotasi dan sirkulasi elit secara normal dan sesuai tuntutan demokrasi, paling penting tetap menjaga roda pemerintahan agar mampu bekerja dan menata kehidupan yang ada, mampu menjawab persoalan yang dihadapi rakyat, sehingga kekuasaan paling tidak dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas. Setiap pemenang dalam proses politik, harus membuktikan diri bahwa pilihan terhadapnya merupakan pilihan sadar yang di sana diletakkan semua ekspektasi dan cita-cita bersama. Buktikan bahwa yang terpilih mampu bekerja mengelola potensi daerah sesuai janji yang diucapkan bagi kemaslahatan banyak orang, bukan untuk kepentingan golongan atau kelompok.

Kita sama berharap, tak ada lagi PNS/ASN yang harus pindah wilayah kerja, hanya karena merasa kurang nyaman akibat pilihan politik yang berbeda. Pemerintahan yang baik tentu tidak hanya merangkul dan merangkum aparatur birokrasi yang suka membeo dan membebek apa kata atasan, tetapi juga memerlukan potensi lain, yang mungkin saja memiliki daya kritis serta kelebihan-kelebihan untuk mengoreksi apa yang telah dilakukan.

Pilihan terhadap sejumlah elit dalam proses politik, kiranya dapat menghadirkan prestasi-prestasi yang membanggakan. Terutama mendorong inovasi dan daya saing daerah di tengah kompetisi era digital, membangun birokrasi sehat dan bersih, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, serta terpenuhinya layanan dasar : pendidikan, kesehatan, air bersih, ekonomi kecil menengah, dan tentu saja tersedianya infrastruktur daerah secara merata dan berimbang. Bukan sebaliknya, rajin memproduksi kasus-kasus yang memalukan masyarakat dan daerah, serta menurunkan marwah pemerintahan.

Mereka yang terpilih harus menunjukkan sifat negarawan sejati, yang sedapat mungkin mengakomodir setiap potensi-potensi aparatur birokrasi sebagai modal politik dalam mendorong kemajuan daerah, sekalipun itu berbeda pilihan. Karena itu, mengelola potensi berbeda dan beragam bagi kemajuan bersama merupakan suatu capaian tertinggi dari mereka yang merasa diri sebagai pemimpin.

### **Siklus Birokrat**

Sejarah birokrasi Maluku Utara adalah lembar kelim tentang karut-marut kinerja aparatus birokrasi yang lamban bergerak untuk menjadi lebih baik. Birokrat kita adalah mereka yang kadang dengan mudah tergoda kegenitan kekuasaan. Atau paling sering terbenam pada urusan patron-klien : “saya mendukung siapa yang berkuasa, maka saya akan menikmati kehidupan yang serba mudah, jabatan, dan bahkan sedikit otoritas.” Itulah siklus birokrasi Maluku Utara.

Maka tidak heran, berapa banyak aparatus birokrasi Maluku Utara yang ketika memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP) mulai genit dan “maniso” pada partai-partai politik. Lalu dengan tiba-tiba kita menyaksikan baliho mereka sudah terpasang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada daerah pilihan. Dan, kita mungkin punya catatan, atau sedikit memori selama ini, bahwa “birokrat-politisi” atau “politisi-birokrat” (terma ini mungkin agak terlalu peyoratif) yang berada pada lembaga legislatif, ternyata belum memberikan perubahan yang berarti bagi daerah.

Berapa banyak mantan pejabat birokrasi yang sekarang duduk sebagai anggota legislatif dan memberikan gagasan berarti bagi perubahan daerah ini? Sepertinya kita belum merasakan secara nyata. Kekhawatiran saya, jangan-jangan para mantan pejabat birokrasi yang mencari peruntungan di wilayah politik hanya karena takut kehilangan pamor, kehilangan prestise, kehilangan privelese, kehilangan rasa penghormatan, dan kehilangan ambisi sehingga tidak diberi label post power syndrom. Dengan memasuki wilayah politik : pamor, prestise, priveles, penghormatan, dan ambisi akan tetap terawat dan terjaga dalam dirinya. Karena itulah, kita kesulitan menemukan birokrat-birokrat yang mau berkhidmat mengurus layanan publik secara serius.

Kita berharap, masuknya para mantan pejabat birokrasi dalam tubuh legislatif agar terjadi perpaduan teknokrasi dan politik yang harmoni. Teknokrasi mengandalkan apa yang diistilahkan Max Weber dengan *instrumental rationality* atau *zweckrationalitaet*, yang hanya memperhatikan cara yang efektif mencapai tujuan, sedangkan politik menyangkut pula *value-rationality* atau *wertrationalitaet*, yang mempersoalkan apakah tujuan yang ditetapkan itu dapat dibenarkan secara rasional, dan apakah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kelayakannya. (Kleden, 2004)

Birokrat kita mudah terombang-ambing oleh tarikan kepentingan, dan senang bermain dalam kolam-kolam politik. Karena itu, tentunya kita semua sangat merasakan bagaimana atmosfir birokrasi Maluku Utara selama ini. Tak pernah serius untuk diurusi.

### **Metafora**

Meminjam metafora Gareth Morgan dalam bukunya *Images of Organization* (1986) dengan imajinasi organisasinya, maka birokrasi sebagai organisasi ibarat mesin (*machine*), yang mengelola dan mengolah segala sumberdaya dan memiliki bagian-bagian untuk menghasilkan produk dan jasa; Birokrasi ibarat organisme (*organism*), seperti tumbuhan atau hewan, birokrasi lahir, tumbuh, berfungsi, dan beradaptasi terhadap perubahan-perubahan lingkungan lalu pada akhirnya ia mati; birokrasi ibarat otak (*brain*). Ia memproses informasi, ia memiliki intelegensi, ia mengonseptualisasi dan ia membuat perencanaan; birokrasi ibarat budaya (*culture*) karena ia mencipta pengertian, memiliki nilai dan norma, dan diperkuat dengan cerita-cerita dan ritual-ritual bersama; birokrasi seperti sebuah sistem politik (*political system*), di mana kekuasaan dibagi, pengaruh dijalankan, dan keputusan-keputusan dibuat;

Birokrasi juga sebagai penjara supranatural (*psychic prisons*) karena ia dapat membentuk dan membatasi kehidupan anggota-anggotanya; birokrasi juga sebagai perubahan dan transformasi (*flux and transformation*), karena ia menyesuaikan diri, berubah, tumbuh atas dasar informasi, umpan balik, dan kekuatan logika.

Dan akhirnya, biokrasi sebagai instrumen dominasi (instrument of domination) karena ia mengandung kepentingan-kepentingan yang bersaing, yang beberapa di antaranya mendominasi yang lain.

Pada titik inilah, seorang birokrat memiliki kapasitas untuk dapat menggerakkan pemerintahan dengan talenta, pengalaman, dan pengetahuan yang dimilikinya. Ketika seorang birokrat terseret masuk pada kisaran politik an sich, boleh jadi kapasitas dan semua kompetensi yang dimiliki akan tak lagi berarti apa-apa bagi jalannya pemerintahan.

Daerah ini membutuhkan pamong yang matang dalam birokrasi. Ketika para senior birokrat yang harus pensiun dan kemudian tiba-tiba memasuki wilayah politik praktis, kita seolah tidak pernah tahu sampai kapan kondisi birokrasi Maluku Utara harus diperbaiki dan harus menjadi lebih baik. De javu, sejarah birokrasi Maluku Utara akan terulang dan berulang dengan cerita yang sama dengan sebelumnya.

Dengan realitas tersebut, kita tidak pernah menjadi bangga dengan para birokrat di Maluku Utara. Alhasil, trajektori perjalanan Maluku Utara sejak dikukuhkan menjadi sebuah provinsi 24 tahun lalu, perlahan-lahan mengalami proses involutif (?). Belum menunjukkan geliat dinamis. Boleh jadi, pendulum untuk menggerakkan dan mengerek ini semua, yakni birokrasi, telah kehilangan daya magisnya. Dalam rentang waktu panjang, birokrasi Maluku Utara hanya disesaki konflik internal antara kepala daerah/wakil kepala daerah, persoalan struktur, dan hal-hal teknis yang tidak substantif. Walau daerah ini pernah menempati posisi teratas dua kali berturut-turut sebagai Provinsi Paling Bahagia (tahun 2017 dan 2021), serta memperoleh pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional. Tapi semua itu tidak dapat menjawab keresahan di lapis bawah.

## **Harapan**

Birokrasi merupakan sebuah harapan. Suatu waktu harus ada birokrat yang "tampil menyelamatkan" wajah pemerintahan Maluku Utara dengan mendidik, membina, atau menciptakan bibit-bibit muda birokrat yang mampu memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat Maluku Utara.

Saya menduga, letak "ketidakberesan" birokrasi pemerintahan Maluku Utara selama ini, karena belum adanya keberanian hadirnya seorang pamong-birokrat yang prominen, yang berkhidmat pada fungsi birokrasi ideal, yang mampu membangun landasan pengetahuan, kemampuan, dan rasionalitasnya dalam menata wajah birokrasi pemerintahan yang lebih anggun dan bermartabat. Kita selama ini lebih mengurus dan menguras energi untuk merawat "birokrat-politik" atau sebaliknya "politik-birokrat," yang ternyata tak mampu menampilkan wajah birokrasi menjadi lebih baik dan profesional dalam tubuh pemerintahan Maluku Utara.

Selamat menikmati.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur hanya kepada Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam, atas ijinNya, buku yang kami beri judul POTRET BURAM PEMERINTAHAN; Politik Birokrasi, Inovasi, Pelayanan Publik & Konflik dapat kami terbitkan.

Melalui program dosen ilmu pemerintahan menulis, kami termotivasi dan tertantang untuk mengerahkan kemampuan menulis tentang isu-isu politik pemerintahan serta yang berkaitan dengan mata kuliah yang kami ampu. Dari semangat itulah, kemudian kami saling memberikan support agar harapan itu dapat diwujudkan.

Dan Alhamdulillah, buku ini merupakan jawaban dari tantangan dan motivasi kami, meskipun hanya berupa kumpulan pemikiran atau bunga rampai, namun buku ini menjadi penanda peradaban bahwa menulis adalah bekerja untuk keabadian sebagaimana kata Pramodya Ananta Toer. Selebihnya, kami hanya merawat nalar bahwa kami tetap ada. Scribo Ergo sum. Aku menulis maka aku ada.

Akhirnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara yang bersedia memberikan sambutan sekaligus memfasilitasi penerbitan buku ini. Terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kami sampaikan kepada Bang Dr. Herman Oesman, M.Si yang sudah memberikan pengantar buku ini ditengah kesibukan beliau yang padat. Semoga buku pertama ini tidak menjadi buku pertama dan terakhir, tetapi menjadi pemacu dan pemicu lahirnya karya-karya berikutnya. Karena karya-karya yang kita abadikan adalah legacy bahwa kita lebih mengagungkan karya daripada sekadar kata.

September 2022

Editor

Syarifuddin Usman

Rasid Pora

## PENGANTAR PENERBIT

Dalam buku ini kita membaca beragam isu yang semuanya berkaitan dengan wajah pemerintahan; birokrasi, pelayanan publik, inovasi dan konflik tapal batas, yang selalu hadir menjadi wacana seksi untuk didiskusikan.

Buku ini juga menjadi bahan masukan dan kritikan bagi penyelenggara pemerintahan mulai dari pemimpin sebagai actor pengambil kebijakan hingga aparat dibawahnya sebagai front office, bahwa di tengah zaman yang berubah cepat, birokrasi juga harus bisa beradaptasi dan mencoba hal-hal baru, keluar dari kejumudan yang stagnan.

Bahwa risalah sederhana ini bukanlah dimaksudkan untuk memberi solusi dan jalan keluar dari sengkarutnya wajah pemerintahan yang berkaitan dengan birokrasi, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan konflik pemerintahan. Risalah ini hanya sekadar menginterupsi agar pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota mengelola pemerintahan yang lebih baik, lebih inovatif dan lebih bermartabat.

Sebagai penerbit, kami berterima kasih sudah di percaya menerbitkan buku ini, dan kami berharap, agar civitas akademika Universitas Muhamamadiyah lebih banyak menghasilkan karya untuk diterbitkan dengan berpegang pada prinsip fastabiqulkhairat, berlomba-lomba dalam kebaikan.

Penerbit

## PERTANGGUNGJAWABAN EDITOR

Banyak hal yang mesti ditulis untuk pemerintah daerah ini, sebagai bagian dari kritikan, sumbangsih pemikiran dan tanggungjawab sebagai akademisi. Terutama soal tata kelola pemerintahan, kinerja birokrasinya, pelayanan publik, inovasi dan juga pengelolaan konflik.

Niat baik ini kemudian mendapat respon teman-teman dosen untuk membuat program yang cukup sederhana, yakni, dosen Ilmu Pemerintahan menulis. Mulailah kami menyusun agenda. Membuat book chapter dengan tema Potret Buram Pemerintahan. Tema ini kami ambil karena beragam permasalahan pemerintahan, entah itu di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota, bahkan desa.

Persoalan-persoalan itu seolah tak pernah habis, bahkan datang bertubi-tubi menambah daftar list persoalan. Pada tata kelola pemerintahan, prinsip-prinsip good governance sangat kami rasakan masih jauh panggang dari api. Artinya belum bisa menjadi harapan publik, meskipun ada pembenahan yang dilakukan. Apalagi soal birokrasinya, masih menyimpan patologi akut yang perlu obat mujarab untuk sembuh. Kami menyebut, birokrasi kita tak pernah move on membangun wajah birokrasi yang melayani.

Yang membuat miris, ketika provinsi dan kabupaten/kota yang lain mencari formula inovasi untuk pelayanan ketika pandemi COVID-19 menyerang, ada yang memanfaatkan dananya untuk di korup. Memanfaatkan bencana untuk mencari untung. Ada juga gaji guru honorer yang belum dibayar, bahkan tunjangan kinerja tenaga kesehatan ditunggak. Dan permasalahan-permasalahan lain yang berkelindan. Sayangnya tak semua bisa kami tulis. Kami harus menyicil satu persatu berdasarkan tema yang sudah kami petakan. Paling tidak sumbangsih tulisan ini bisa menjadi pikiran bersama, bahwa provinsi Maluku Utara yang akan menapak 23 tahun (Oktober 2022) bersama kabupaten/kota yang lain harus keluar dari jebakan labirin yang diciptakannya sendiri. Tak heran, wacana yang diproduksi oleh pemerintah masih sama. Meminjam istilah Yasraf Amir Piliang dalam *Hantu-Hantu Politik dan Matinya Sosial* (2003) Sama-sama memproduksi Kamouflage Semiotik. Kamouflage adalah

perubahan pada tingkat permukaan tanda atau kulit luar (form), tetapi esensi, isi atau substansinya tidak berubah (content). Kamuflase semiotik dipenuhi kamuflase tanda, penyamaran citra dan penyembunyian makna.

Artinya, selama pemerintahan ini ada, kita tak pernah beringsut dari banalitas politik; hal yang remeh temeh, perebutan kuasa, perebutan pengaruh dan juga berbagai skandal yang melingkarinya. Sementara di sisi lain, bagaimana membuat Maluku Utara menggeliat dan bertransformasi kearah yang lebih baik dan bermartabat, seolah senyap ditengah keriuhan yang semu.

Perebutan ruang politik, rasanya tak pernah sepi. Terkurusnya energi untuk hight politik tidak menyisakan lagi energi untuk proses perubahan atau transformasi di bidang ekonomi, dinamika social, percepatan produksi dan perlombaan kemajuan. Hal yang paling terang soal itu bisa dilihat dari indeks inovasi provinsi dan bebrapa kabupaten/kota yang sangat rendah.

Kita lalai, bahwa perkembangan mutakhir teknologi komunikasi, informasi, dan internet yang telah menembus batas-batas ruang dan waktu dan menciptakan kondisi saling terhubung dan saling tergantung secara global menyebabkan pelayanan semakin cergas (gesit dan cepat) karena dunia semakin dikuasai oleh waktu dan kecepatan.

Di dalam dunia yang berlari -meminjam Yasraf Amar Piliang-, waktu dan kecepatan menjadi energi utama untuk menggerakkan mesin kemajuan atau perubahan. Siapa menguasai waktu, ia akan menguasai dunia. Sebaliknya, siapa yang tidak mampu mengendalikan waktu dan perubahan akan menjadi korban dari dunia yang berlari. Ketidakmampuan untuk hidup di dalam bahasa-bahasa perubahan, pergerakan, peralihan, kemajuan, transformasi, mutasi yang didukung oleh mentalitas, gaya hidup, etos kerja, tingkah laku, cara berpikir, dan cara bertindak yang serba cepat akan menyebabkan mereka terlindas oleh deru mesin waktu globalisasi. Dan boleh jadi, daerah ini memang telah terlindas oleh deru mesin waktu globalisasi, karena masih terperangkap dalam labirin yang dibuatnya sendiri.

Bisa jadi, pemerintah daerah Provinsi juga kabupaten/kota tak memiliki kemampuan untuk melihat masa depan (future), tidak mampu melakukan prediksi, tidak mampu menyusun sebuah utopia. Sebaliknya pemerintah hanya mampu menjalankan model kehidupan taken for granted, yaitu pengulangan-pengulangan pola tingkah laku, tindakan dan aksi dari hari ke hari sehingga tidak mampu secara kritis merubah diri kearah yang lebih baik, lebih elegan, lebih demokratis, dan bahkan (mungkin) lebih beradab dan lebih human.

Dalam konteks tindak tanduk, cara berpikir, atau cara kerja, pemerintah daerah dalam amatan kami tidak (mampu) menyusun ide besar (grand design) yang menjadi landasan dari berbagai tindakan sosial, politik dan ekonomi dan kultural. Artinya pemerintah daerah tidak bisa melakukan proses transendensi dan tak mampu melakukan proses dialektika terhadap perubahan saat ini.

Dan permasalahan-permasalahan yang kami sebut diatas, di tulis dengan beragam perspektif yang kami bagi dalam 3 potret. Potret pertama berisi tulisan Budaya politik dan konflik pemerintahan. Pemerintahan sesungguhnya memang hadir untuk rakyat. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini diulas oleh Abdul Halil H.Ibrahim dalam tulisannya Pemerintahan untuk Rakyat. Sementara budaya politik lokal di Maluku Utara melalui jejak empat kesultanan yang disebut Moloku Kie Raha yang menjadi identitas daerah, dielaborasi H.Iksan M.Arsad secara gamblang. Dan tentu saja, ketika kita memilih otonomi daerah sebagai praktik pemerintahan namun di sisi lain, ada ancaman konflik yang senantiasa mengiringi pemekaran daerah, yakni konflik tapal batas yang seringkali menjadi pekerjaan rumah dua pemerintahan dan terlalu ruwet diselesaikan. Bakri La Suhu mencoba mendeskripsikan Konflik Tapal Batas di Pulau Halmahera antara Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur.

Pada potret kedua, Partai Politik dan Birokrasi Pemerintahan berisi tiga tulisan yang mengurai tentang partai politik dan

birokrasi. Tulisan pertama tentang Partai Politik dan Rekrutmen Politik, Abdullah Kaunar memotret menggunakan konsep-konsep partai dan rekrutmen politik. Pada tulisan kedua, Rasid Pora mencoba menafsirkan politik birokrasi dan kaitannya dengan patronase. Rasid juga mencoba menganalisis masalah netralitas birokrasi yang sampai saat ini tak pernah tuntas meskipun begitu kuatnya reformasi birokrasi. Terkait dengan itu, Sahrul Pora menengahkan tugas birokrasi sebagai pelayan yang memerlukan transformasi peran dengan kapasitas yang mumpuni.

Pada potret ketiga, pemerintahan, inovasi, pelayanan dan otonomi, berisi sejumlah case study tentang inovasi, pelayanan publik dan debatable soal Sofifi apakah di dorong menjadi DOB atau sebagai kawasan khusus. Tulisan pertama, Syarifuddin Usman mencoba membangun argumen keterkaitan inovasi daerah, good governance, birokrasi dan pelayanan publik. Tak dapat di sangkal, bahwa birokrasi memegang peran kunci dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan membangun pelayanan prima melalui berbagai inovasi.

Inovasi secara esensial berarti memberikan kemudahan, kecepatan, dan keunggulan: mudah bagi pengguna layanan, mudah bagi pelaku, mudah pula bagi tata kelola organisasi. Kemudahan dan kecepatan itulah yang mesti menjadi tujuan penting inovasi. Ada sejumlah catatan tantangan inovasi daerah yang sangat menentukan. Pertama, sangat tergantung dari model kepemimpinan untuk menumbuhkan dan mewartakan keberinovasian. Kedua, Sumber Daya Manusia (SDM) Ketiga, pengetahuan adalah kekuatan. (Knowledge is Power). Dalam analisisnya, birokrat di Maluku Utara termasuk juga kepala daerah, miskin inovasi dan selalu ingin berada di zona nyaman sehingga birokrat dan pemerintah daerah sulit move on. Pada tulisan kedua, Rahmat Suaib mencoba melihat pelayanan publik pasca pembentukan daerah otonom baru dengan pendekatan kajian teoritik analitik. Menurutnya, berdasarkan laporan Ombudsman perwakilan Maluku Utara, kualitas pelayanan public di wilayah Maluku Utara sangat rendah. Tulisan ketiga oleh Vivi Noviyanti, menulis hasil penelitian tentang kualitas pelayanan pajak

kendaraan bermotor di UPTB Samsat Kota Ternate. Hasil kesimpulannya, kualitas pelayanan dari 5 dimensi, yaitu Tangibel (berwujud), Reliability (kehandalan), Responsiviness (Respon/Ketanggapan), Assurance (Jaminan), Empathy (Empati) dan masing-masing dimensi memiliki indikator-indikator, sehingga diperoleh kesimpulan berdasarkan jawaban tertinggi responden terhadap kualitas pelayanan adalah memuaskan. Untuk tulisan pamungkas, ditutup dengan tulisan Ali Lating soal diskursus pengembangan Sofifi sebagai kawasan khusus yang sepertinya tak habis dibahas karena sepertinya Jakarta (baca Pemerintah pusat) tidak serius Sofifi dijadikan kawasan khusus sehingga Sofifi hanya menjadi Imajinasi Jakarta.

Semoga buku ini bisa memberikan sesuatu kepada pembaca, terutama khasanah dan perspektif yang berbeda sehingga bisa muncul tulisan-tulisan lain yang boleh jadi melengkapi dan memperkaya referensi yang sudah ada.

Kami meyakini, bahwa dengan program dosen ilmu pemerintahan menulis, akan lebih banyak menghasilkan karya literasi yang membahas tema tertentu dengan beragam perspektif namun dengan core pemerintahan.

Keberanian untuk menerbitkan tulisan yang terhimpun dalam buku ini tidak dimaksudkan bahwa kami merasa pintar dan hebat, tapi ini sekadar cetusan rasa, bahwa tata kelola pemerintahan kita; apakah itu birokrasinya, pelayanan publiknya, serta inovasi daerah, akan selalu menjadi pekerjaan rumah jika tidak merubah mindset dan move on bahwa saat ini dunia sedang berubah secara cepat!

Akhirnya, kami juga sadari, bahwa sudah pasti ada kelemahan buku ini, baik secara teknis maupun substansi, karena tak ada gading yang tak retak, kelemahan tersebut tetap menjadi tanggung jawab kami selaku tim editor.

Ternate, Agustus 2022

Editor

Syarifuddin Usman

Rasid Pora



**Birokrasi Adalah Kelaliman Dari Kelambanan.**  
**Emile de Girardin**  
**(Wartawan dan Politikus dari Perancis 1802-1881)**



## DAFTAR ISI

<b>SAMBUTAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>xii</b>
<b>PENGANTAR PENERBIT.....</b>	<b>xiii</b>
<b>PERTANGGUNGJAWABAN EDITOR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>POTRET #I Budaya Politik Dan Konflik Pemerintahan .....</b>	<b>1</b>
<b>PEMERINTAHAN UNTUK RAKYAT .....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
<b>BUDAYA POLITIK LOKAL DAN DINAMIKA POLITIK</b>	
<b>PEMILU MALUKU UTARA .....</b>	<b>10</b>
A. Pendahuluan.....	11
B. Kajian Teori Dan Metodologi.....	12
C. Nilai Politik Lokal Determinan Dan Relasi Kekuasaan Dalam Kultur Politik Lokal Maluku Utara .....	14
D. Persepsi Warga Terhadap Kebijakan Dan Dukungan Politik Dalam Pemilu.....	16
E. Kesimpulan.....	30
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>31</b>
<b>KONFLIK TAPAL BATAS DI PULAU HALMAHERA .....</b>	<b>33</b>
A. Pengantar .....	33
B. Batas Wilayah dalam Tinjauan Regulasi.....	35
C. Mediasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Halmahera Timur dan Halmahera Tengah .....	38
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>46</b>

<b>POTRET #II Partai Politik dan Birokrasi Pemerintahan.....</b>	<b>47</b>
<b>PARTAI POLITIK DAN REKRUTMEN POLITIK.....</b>	<b>48</b>
A. Pendahuluan.....	48
B. Rekrutmen Politik dalam Perspektif Teoritik .....	50
C. Partai Politik dan Fungsi Rekrutmen Politik .....	51
D. Rekrutmen Kandidat.....	56
E. Karakter Demokrasi Langsung (Pemilihan Kepala Daerah Langsung); Terbukanya Ruang Perdebatan antara Kader dan Non Kader .....	59
F. Rekrutmen Inklusif; Kegagalan Kaderisasi Parpol?.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67</b>
<b>POLITIK BIROKRASI.....</b>	<b>69</b>
A. Pendahuluan.....	69
B. Politik dan Birokrasi: Sebuah Kajian Teoritis.....	72
C. Patronase Politik Dalam Tubuh Birokrasi.....	75
D. Potret Buram Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)..	80
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>86</b>
<b>BIROKRASI ITU MELAYANI .....</b>	<b>88</b>
A. Pendahuluan.....	88
B. Konsep Birokrasi Sebagai Pelayan Publik.....	90
C. Subtansi Reformasi Birokrasi.....	95
D. Peningkatan Kapasitas Birokrasi.....	98
E. Transformasi Birokrasi Berbasis Teknologi.....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>106</b>
<b>POTRET #III Pemerintahan, Inovasi Pelayanan dan Otonomi</b>	<b>108</b>
<b>INOVASI DAERAH DAN GOOD GOVERNANCE .....</b>	<b>109</b>
A. Pendahuluan.....	110
B. Catatan Kritis untuk Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.....	113

C. Konsep Birokrasi, Good Governance, Inovasi, dan Pelayanan Publik.....	117
D. Tantangan Inovasi Daerah; Catatan Penutup.....	132
DAFTAR PUSTAKA .....	137
<b>PARADIGMA PELAYANAN PUBLIK PASCA</b>	
<b>PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU .....</b>	<b>139</b>
A. Pendahuluan.....	139
B. Konsep Pelayanan Publik.....	143
C. Basis Argumentasi Teoritik Pelayanan Publik .....	148
D. Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Pelayanan Publik .....	155
E. Implikasi Otonomi Daerah Terhadap Pelayanan Publik .....	157
DAFTAR PUSTAKA .....	161
<b>KUALITAS PELAYANAN PAJAK KENDARAAN</b>	
<b>BERMOTOR DI UPTB SAMSAT KOTA TERNATE .....</b>	<b>165</b>
A. Pendahuluan.....	165
B. Metode .....	168
C. Hasil Dan Pembahasan.....	168
D. Kesimpulan.....	177
DAFTAR PUSTAKA .....	178
<b>SOFIFI DAN IMAJINASI JAKARTA.....</b>	<b>179</b>
A. Pendahuluan.....	179
B. Legal Formal Kawasan Khusus. ....	180
C. Persyaratan Administratif Dan Teknis.....	181
D. “Kawasan Khusus” Imajinasi Jakarta Menjawab Stagnasi Pembangunan.....	183
E. Koordinasi Dan Konsolidasi Mewujudkan Kawasan Khusus. ....	185
F. “Maklumat Sultan Harga Mati ” Sofifi Perlu	

Pengembangan Bukan Kawasan Khusus .....	186
G. Masa Depan Sofifi; Memastikan Kebijakan Pengembangan.....	187
H. Epilog.....	188
DAFTAR PUSTAKA.....	189
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>191</b>
<b>INDEKS .....</b>	<b>206</b>
<b>TENTANG PENULIS.....</b>	<b>209</b>



**POTRET BURAM PEMERINTAHAN**  
**(POLITIK BIROKRASI, PELAYANAN PUBLIK,**  
**INOVASI DAN KONFLIK)**





# **POTRET #I**

**Budaya Politik Dan  
Konflik Pemerintahan**



## PEMERINTAHAN UNTUK RAKYAT

*Abdul Halil Hi.Ibrahim*



**M**ukadimah UUD 1945 jelas sekali, yakni "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...." telah memberi kita landasan suatu *Welvaarts-staat* suatu negara dimana pemerintahannya menempatkan kepentingan rakyat di tengah-tengah eksistensinya. Jadi, kalau kita masih mempertanyakannya maka "*something must be wrong*" dalam kehidupan bernegara kita.

Tema kajian yang diberikan panitia (Kontribusi Ilmu Pemerintahan Dalam Pembangunan Daerah) sangat luas, Maka penulis mempersempit kajiannya dalam perspektif *government for the people* yang berintikan pertanyaan tentang hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya dan kalau kita pertajam pertanyaan tersebut maka bunyi permasalahan kita ialah hubungan pemerintah dengan rakyatnya dalam tatanan *Welvaarts-staat*. Memang ada beberapa tuntutan terhadap pemerintah maupun rakyat dalam *Welvaarts-staat*.

1. Tuntutan terhadap pemerintah, antara lain "perubahan sikap dari *heerschaft* menjadi *hilfe* dari kekuasaan menjadi pelayanan, jadi tidak memerintah melainkan melayani, tidak menunggu melainkan aktif bertindak, lebih memperhatikan dan memecahkan masalah-masalah yang konkret serta memperhatikan masalah-masalah dari perorangan dan kelompok yang berorientasi pada mengurangi ketimpangan dan ketergantungan. Ini menuntut fleksibilitas, kemampuan penyesuaian diri, kemampuan untuk membuka dari

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdilah S., Ubed, 2002. *Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*, Magelang: Indonesiatera.
- Anderson, Benedict, ed (2001), *Violence and the State in Suharto's Indonesia*, Ithaca: Southeast Asia Program, Cornell University.
- Abed, George T., and Gupta, Sanjeev, 2002, *Governance, Corruption & Economic Performance*, IMF: Washington, D.C.
- Bailey, Stephen J., 1999, *Local Government Economics: Principles and Practice*, Macmillan Press Ltd.: London.
- Bird, Richard M. dan Vaillancourt, Francois, 2000, *Desentralisasi Fiskal di Negara-negara Berkembang*, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Cho, Chang-hyun, and Meinardus, 1996, *Local Autonomy and Local Finance*, CLA Hanyang University: South Korea.
- Davey, K.J., 1988, *Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*, UI Press: Jakarta
- Hardjosoekarto, 2002, *Hubungan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, *Jurnal Administrasi Negara* Vol. II No. 2
- Gidden, Anthony, 2000. *Jalan Ketiga, Pembaruan Demokrasi Sosial*, terj. Ketut Arya Mahardika, Jakarta: Gramedia Pustaka
- Ibrahim, Halil Abd Hi, and Supriatna Tjahja. "Epistemologi Pemerintahan, Paradigma Manajemen, Birokrasi Dan Kebijakan Pulik." Yogyakarta: Penerbit Gramasurya (2019)
- Ibrahim, Abdul Halil Hi. "Influence of Political Parties, Bureaucracy Authority, Role of Election Supervisory Committee and Community Participation on the Performance of General Elections Commission." (2017).

# BUDAYA POLITIK LOKAL DAN DINAMIKA POLITIK PEMILU MALUKU UTARA

Iksan R.A Arsad



## Abstrak

**B**udaya politik adalah seperangkat nilai atau norma dasar yang diikuti warga, dan menjadi pegangan dalam kehidupan berpolitik. Ia merupakan hasil dari orientasi warga negara terhadap sistem politik. Orientasi itu ditujukan terhadap objek-objek politik berupa seperangkat nilai atau norma, falsafah politik, kekuasaan, dan objek politik lainnya yang membentuk pola perilaku politik warga. Budaya politik Lokal di Maluku Utara adalah hasil dari orientasi warga atas seperangkat nilai determinan dan falsafah politiknya yang memengaruhi sikap dan perilaku politik warga. Nilai politik determinan yang memengaruhi perilaku politik warga itu adalah nilai kesetiaan, nilai persatuan, nilai persaudaraan, nilai kepekaan, dan nilai adaptasi. Di samping itu terdapat falsafah pola hubungan patron-klien antara Sultan dan warganya dalam falsafah *Jou se Ngofangare* yang menjelaskan diperlukannya keteladanan aktor politik sehingga seorang pemimpin seperti Sultan dituntut sebagai pengganti Nabi (*Tubaddur Rasul*). Implikasinya adalah setiap kebijakan Pemimpin (Sultan, Gubernur dan yang lainnya) harus mencerminkan kehendak rakyat sehingga warga dapat mendukung kebijakan pemimpinnya, dan sebaliknya kebijakan itu akan ditolak bila kebijakan itu tidak mencerminkan tata aturan pemerintahan tradisional yang berlaku, termasuk kebijakan Sultan tentang dukungan warga terhadap calon Gubernur atau partai dalam pemilihan umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Ide Anak Agung Gde, *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985).
- Ahmad, Saiful, *Politik dan Etnik: Studi Kasus Konflik Politik dalam Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2007*, (Jakarta: Program Pascasarjana FISIP UI, 2012, disertasi).
- Amal, M. Adnan, *Maluku Utara : Perjalanan Sejarah 1250-1800, Jilid I*, (Ternate: Universitas Khairun, 2002).
- Arsad, Iksan R.A., *Budaya Pemerintahan: dari Maluku Utara untuk Kybernologi* (Ternate: UMMU Press, 2011).
- Aspinall, Edward dan Marcus Mietzner, *Problems of Democratisation in Indonesia*. Singapore: ISEAS: 75-99.
- Budiardjo, Miriam, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991).
- Danandjaja, Andreas A., *Sistem Nilai Manajer Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Binaman Presindo, 1986).
- Hoefstede, Gert, *Culture's Consequences International Differences in Work-related Values*, (California: Sage Publ, Beverly Hills, 1980).
- Ishiyama, John T., dan Marijke Breuning (eds), *Ilmu Politik dalam Paradigma Abad ke-21: Sebuah Referensi Panduan Tematis*, (pen. Ahmad Fedyani Syaifuddin), (Jakarta: Kencana, 2013).
- Leirissa, R.Z., Adrian B. Lopian, Uka Tjandrasasmita, M. Saleh Putuhena, Abd. Rahman Marasabessy, Mudaffar Syah, Jusuf Abdulrahman, Kasijanto, Titik Pujiastuti, E.K.M. Masinambow, J.W. Ajawaila dan Herry RD. Nachrawy, *Ternate: Bandar Jalur Sutera*, (Jakarta: Kerjasama Penerbit

Lintas, Yayasan Adikarya IKAPI Program Pustaka III – The Ford Foundation, 2001).

Mas'ood, Mochtar dan Colin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1997).

Radjiloen, L., *Dataran Tinggi Foramadiah adalah Ternate Awal ke Dataran Rendah Limau Jore-Jore sebagai Ternate Akhir*, (Ternate: Seksi Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Utara, 1982, terbatas).

Ranney, Austin. 1993. *Governing, An Introduction to Political Science*, (New Jersey: Prentice-Hall International, Inc, 1993).

Surjo, Djoko, Nasikun, Cornelis Lay, Fajrul Falakh, Budhy K. Zaman, Aris Arif Mundayat, dan Marthia Adelheida, *Agama dan Perubahan Sosial: Studi tentang Hubungan antara Islam, Masyarakat, dan Struktur Sosial-Politik Indonesia*, (Yogyakarta; Universitas Gadjah Mada Press, 2001).

Syah, Mudafar, *Lingkungan Hukum Adat Ternate*, (Ternate: Keraton Ternate, 1996, terbatas).

Ufen, Andreas, *Electoral Campaigning in Indonesia: The Professionalization and Commercialization after 1998*, in *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 29, 4, 11-37.

Van Klinken, Gerry, *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*, (Jakarta: KITLV-Yayasan Obor Indonesia, 2007).

Noor, Firman, *Perilaku Politik Pragmatis dalam Kehidupan Politik Kontemporer: Kajian atas Menyurutnya Peran Ideologi Politik di Era Reformasi*, dalam *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 40 (1), Juni 2014.

# KONFLIK TAPAL BATAS DI PULAU HALMAHERA (Mediasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara Dalam Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Halmahera Timur Dan Halmahera Tengah)

Bakri La Suhu



## A. Pengantar

Otonomi daerah pada dasarnya memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan kondisi daerah serta memperhatikan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan pengganti dari UU No. 32/2004 sebagai legal formal dari pelaksanaan otonomi daerah membawa paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Akibat dari keleluasaan yang dimiliki pemerintah daerah dalam menjalankan segala kewenangannya membawa banyak implikasi di lapangan. Salah satu implikasi yang menonjol serta terus berlangsung sampai sekarang adalah keinginan dari berbagai daerah-daerah baik provinsi, kabupaten/kota untuk memekarkan wilayahnya membentuk daerah otonom baru.

Pemekaran daerah dalam tatanan filosofis dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 129/2000), hal ini pun secara tegas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007. Alasan lainnya yang juga dikemukakan adalah bahwa pemekaran akan mengembangkan demokrasi lokal melalui pembagian kekuasaan pada tingkat yang lebih kecil (Laode Ida, 2005). Dari uraian tersebut mencerminkan bahwa alasan utama masyarakat dan elit lokal yang menuntut daerah otonom baru untuk dimekarkan secara umum berkaitan dengan alasan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Lahirnya *euphoria* pemekaran wilayah juga cukup mengkhawatirkan, karena banyak usulan pemekaran daerah

## DAFTAR PUSTAKA

- Laode Ida, 2005, *Permasalahan Pemekaran Daerah di Indonesia*, Media Indonesia
- Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, PT. RinekaCipta, Jakarta, 2001
- M. Zaki Mubarak, 2006. *Blue Print Otonomi Daerah Indonesia*. Jakarta, Yayasan Harkat Bangsa (The YHB Center).
- Laporan Hasil Investigasi di Kabupaten Halmahera Tengah terkait Sengketa Batas Daerah Antara Kab. Halmahera Timur dan Kab. Halmahera Tengah, yang dilakukan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Maluku Utara, pada tanggal 3 Juli 2015
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.
- <https://www.antaranews.com/berita/569442/kemendagri-tetapkan-tapal-batas-haltim-halteng>,
- <http://beritasore.com/2007/12/10/depdagri-11-provinsi-yang-menyelesaikan-batasdaerah/Depdagri:11ProvinsiYangMenyelesaikanBatasDaerah> Posted by Redaksi on Desember 10, 2007.



# **POTRET #II**

**Partai Politik dan  
Birokrasi Pemerintahan**



# PARTAI POLITIK DAN REKRUTMEN POLITIK

Abdullah Kaunar



## A. Pendahuluan

**D**alam sistem demokrasi, eksistensi partai politik merupakan sebuah keharusan. Upaya demokratisasi membutuhkan sarana atau saluran politik yang koheren dengan kebutuhan masyarakat di sebuah negara. Partai politik adalah salah satu sarana yang dimaksud, yang memiliki ragam fungsi, *platform* dan dasar pemikiran. Fungsi dan *platform* partai politik itulah, yang salah satunya bisa dijadikan pertimbangan untuk menilai demokratis tidaknya suatu pemerintahan. Atau paling tidak bisa digunakan untuk menilai apakah proses demokrasi yang berjalan di suatu negara menghasilkan output kebijakan untuk kepentingan rakyat atau sebaliknya.

Partai politik sebagai penyambung aspirasi masyarakat dengan pemerintah, maka partai politik diharapkan dapat menjalankan fungsinya secara efektif. Salah satu prasyarat dari terwujudnya demokrasi yaitu adanya partai politik yang berfungsi maksimal dan efektif sebagai wadah aspirasi politik masyarakat dan sebagai media untuk melakukan *bargaining* kebijakan dengan negara (pemerintah, baik pusat maupun daerah).

Seperti diketahui bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. (Miriam Budiardjo, 2008).

Salah satu upaya untuk memperebutkan kekuasaan dan merebut kedudukan politik di lembaga-lembaga pemerintahan melalui sebuah proses demokrasi yang biasa kita kenal dengan

## DAFTAR PUSTAKA

- Amal, Ichlasul, *"Teori-teori Mutakhir Partai Politik"*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1996.
- Budiardjo Miriam, *"Dasar-dasar Ilmu Politik"*, Gramedia, Jakarta, 2008.
- Cipto Bambang, *"Prospek dan Tantangan Partai Politik"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996.
- Erawan, I Ketut Putra, *"Mission of Possible?; Reformasi Kepartaian di Indonesia"*, Makalah, tidak dipublikasikan, 2004.
- Gaffar Afan, *"Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Haboddin Muhtar dan Gregorius Syahdan, *"Evaluasi Pilkada di Indonesia"* IPD-KAS, Yogyakarta, 2009.
- Haryanto, *"Partai Politik Suatu Tinjauan Umum"*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Koirudin, *"Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Lay Cornelis, *"Involusi Politik; Esai-esai Transisi Indonesia"*, Program Pasca Sarjana (S2) PLOD UGM, Yogyakarta, 2008.
- Lay Cornelis, *"Rekrutmen Elit Politik"*, dalam Prisma No.4, 1997.
- Marijan Kacung, *"Demokratisasi di Daerah (Pelajaran Dari Pilkada Langsung)"*, Pustaka Eureka, Surabaya, 2006.
- Pamungkas Sigit, *"Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia"*, Institute for Democracy and Welfarism, Yogyakarta 2011
- Ranney, B.H, *"Political and Voters"*, New York, 1981
- Sahdan Gregorius dan Haboddi Muhtar, *"Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia"* The Indonesia Power for Democracy (IPD), Yogyakarta, 2009.

Sartori Giovanni, *"Parties and Party Systems" a frame work for analysis*, Cambridge University Press, 1976.

Surbakti Ramlan, *" Memahami Ilmu Politik"*, Grasindo, Jakarta, 1992.

**Sumber Lain:**

Bahan Bacaan Utama Mata Kuliah, *Partai Politik, Pemilu dan Legislasi Daerah*, S2 PLOD UGM Angkatan XVI, 2006

Erawan, I Ketut Putra, *"Mission of Possible?; Reformasi Kepartaian di Indonesia*, Makalah, tidak dipublikasikan, 2004.

Richards S. Katz dan William Crotty, *"Handbook Party Politics"*, 2006.

# POLITIK BIROKRASI

## Tafsir atas Penyelenggaraan Birokrasi di Indonesia

Rasyid Pora



### A. Pendahuluan

**M**embincangkan kaitan politik dan birokrasi sampai saat ini masih menjadi tema yang menarik untuk didiskusikan. Hal tersebut lantaran politik dan birokrasi menjadi dua hal yang sejauh ini masih belum dapat dipisahkan satu sama lain dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Kehadiran birokrasi dalam sebuah negara tentunya untuk menjalankan setiap keputusan politik yang telah dibuat oleh lembaga eksekutif maupun legislatif. Dengan begitu birokrasi pemerintahan menjadi faktor penting dalam merealisasikan keberhasilan kerja-kerja pemerintahan. Birokrasi sebagai organisasi modern sebagaimana yang dikembangkan oleh Max Weber, merupakan bentuk organisasi yang ideal dan rasional dalam menjalankan sistem administrasi pemerintahan. Kecerdasan Weber dalam menghadirkan gagasan tentang karakteristik ideal dari birokrasi legal-rasional, dengan menjadikannya untuk dapat menjalankan tujuan-tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Munculnya birokrasi sebagaimana bayangan Weber pada awalnya dimaksudkan untuk memenuhi tugas-tugas administratif pemerintahan yang semakin luas dan kompleks sehingga dapat diatur menjadi lebih mudah dan efektif. Rasionalitas organisasi yang ditawarkan melalui birokrasi ideal Weber ialah diisi oleh orang-orang yang dapat bekerja dalam menyusun aktifitas kerjanya secara jelas, dan punya tujuan yang terukur dengan berdasarkan pada aturan tertulis. Dengan begitumemungkinkan untuk organisasi tersebut terus mengevaluasi kerjanya apakah telah mencapai tujuan yang efektif dan tujuan tersebut dapat dicapai dengan

## DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah. (2003). *Politik Dan Birokrasi: Reposisi Peran Birokrasi Publik dalam Proses Politik Lokal*. Dipresentasikan Dalam Seminar Birokrasi, S2 Ilmu Administrasi Negara, Universitas Gadjah Mada, 1, 50-77.
- Diana, B. A. (2020). *Pengaruh Politik Dalam Birokrasi Pemerintahan. Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 2(1), 1-7. <https://doi.org/10.15575/jbpd.v2i1.7585>
- Emanratu, P. F. (2021). *Birokrasi Kabupaten Kepulauan Tanimbar Sebagai Gelanggang Patronase*. <https://doi.org/10.31237/osf.io/f6bj2>
- Gedeona, H. T. (2013). *Birokrasi Dalam Praktiknya Di Indonesia: Netralitas Atau Partisan?* *Jurnal Ilmu Administrasi*, 10(02), 14.
- HM, P. & Hapsa. (2019). *Praktik Patronase Politik Di Indonesia Pasca Reformasi Dan Upaya Mengatasinya*. *Jurnal Majelis*.
- Minan, A. (2020). *Netralitas birokrasi Dan Abuse Of Power Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Kajian Hukum Penerapan Pasal 71 UUU Nomor 1 tahun 2015 Dalam pemilihan Kepala Daerah*. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1, 37-52.
- Nuraini, H. (2017). *Birokrasi, Kekuasaan Dan Bisnis*. 5(1), 5.
- Ode Wahiyuddin, L. (2022). *Perjalanan Politik Birokrasi Di Indonesia: (Kajian Teori dan Analisis Konsep)*. *Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal*, 2(1), 44-54. <https://doi.org/10.51454/parabela.v2i1.510>
- Perdana, G. (2019). *Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi (Protecting The ASN Neutrality From Bureaucracy Politicization)*. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 10(1), 109-128. <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1177>

- Pratama, R. A. (2017). *Patronase Dan Klientalisme Pada Pilkada Serentak Kota Kendari Tahun 2017*. *Jurnal Wacana Politik*, 2(1), 12.
- Prayitno, B. (2011). *Birokrasi Dan Politik: Problematika Dalam Keniscayaan Administrasi Publik*. *Jurnal Wacana Kinerja*, 14(1), 17.
- Rakhmawanto, A. (2020). *Analisis Politisasi Birokrasi Dalam Pembinaan Aparatur Sipil Negara*. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 14, 12.
- Sarnawa, B. (2018). *Pergeseran Aturan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum*. *Jurnal Media Hukum*, 25(2).  
<https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0113.181-189>
- Sugiharto, I. (2019). *Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah*. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 18(1).  
<https://doi.org/10.31941/pj.v18i1.1086>
- Yudiatmaja, W. E. (2015). *Politisasi Birokrasi: Pola Hubungan Politik dan Birokrasi di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 19.  
<https://menpan.go.id/site/berita-terkini/pilkada-2020-menteri-tjahjo-tegaskan-hak-politik-asn-hanya-di-bilik-suara>

# BIROKRASI ITU MELAYANI

## Transformasi Peran dan Kapasitas

Sahrul Pora



### A. Pendahuluan

**B**irokrasi sebagai organisasi pemerintah akan selalu berinteraksi dengan masyarakat, karena keberadaan birokrasi yang merupakan pemberi pelayanan publik dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagaimana yang kita diketahui bahwa perkembangan dimensi kehidupan masyarakat dari berbagai sendi turut memberikan pengaruh atas peningkatan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Dengan begitu birokrasi juga harus mampu menyesuaikan diri dengan dimensi perubahan tersebut terutama yang berhubungan dengan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik. Akan tetapi situasi penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia pada saat ini masih jauh dari kata maksimal. Hal itu disebabkan oleh minimnya kompetensi yang dimiliki oleh aparatur birokrasi, standar pelayanan yang tidak jelas, serta komitmen yang kurang dari aparat birokrasi untuk menghasilkan pelayanan yang berkualitas.

Pelaksanaan pelayanan publik merupakan salah satu tugas yang paling penting dari pemerintah baik di level pusat maupun level daerah untuk memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat. Dalam memberikan pemenuhan atas hak dan kebutuhan masyarakat tersebut, penyelenggaraan pelayanan publik harus didasarkan pada pelayanan yang memadai, berkualitas, agar terciptanya pelayanan yang efektif dan efisien. Kebijakan pelayanan publik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 dijelaskan bahwa, pelayanan publik merupakan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pelayanan tersebut diberikan kepada seluruh warga negara dan penduduk,

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, F., & Sadat, A. (2020). *Model Pelayanan Publik Terhadap Reformasi Birokrasi*. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 16–25. <https://doi.org/10.35326/Jsip.V1i1.525>
- Adnan, M. F. (2014). *Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik*. *Humanus*, 12(2), 196. <https://doi.org/10.24036/jh.v12i2.4038>
- Akbar, G. G., Rulandari, N., & Widaningsih, W. (2021). *Reformasi Birokrasi Di Indonesia, Sebuah Tinjauan Literatur*. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(2), 187–199. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v4i2.1981>
- Arifah, U. (2020). *Transformasi Birokrasi Melalui E-Government*. *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan studi sosial*, 4(2), 30–41. <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v4i2.245>
- Diana, B. A. (2020). *Pengaruh Politik Dalam Birokrasi Pemerintahan*. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.15575/jbpd.v2i1.7585>
- Fatum, H., Bazarah, J., & Ahmad, J. (2021). *Konsep Pelayanan Publik Di Indonesia (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia)*. *DEDIKASI*, 22(2), 105. <https://doi.org/10.31293/ddk.v22i2.5860>
- Firdaus, S. U. T., & Hasbullah, H. (2020). *“Revolusi Mental” Birokrasi Di Indonesia: Good Governance*. *PUBLIC CORNER*, 14(2), 13–25. <https://doi.org/10.24929/fisip.v14i2.889>
- Irawan, B., & Saputro, A. (2021). *Penerapan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Melalui Web Domain Di Kota Surakarta*. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 6(2), 59–67. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v6i2.4386>
- Kusuma, T. P., Setyadi, D. S., Andaru, I. W., & Roziqin, A. (2022). *Reformasi Birokrasi Dalam Aspek Efisiensi Dan Transparansi Pada Pelayanan Birokrasi Pemerintahan Kota Batu*. *AS-SIYASAH*:

Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 7(1), 1.  
<https://doi.org/10.31602/as.v7i1.5160>

Parjaman, T., Soedarmo, U. R., & Enas. (2019). *Penguatan Kapasitas Aparatur Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah Di Era Global*. *Journal of managementReview*, 1, 29–42.

Paskarina, C. (2017). *Menundukkan Birokrasi: Melacak Pertarungan Kuasa Dibalik Wacana Reformasi Birokrasi*. *CosmoGov*, 1(1), 71.  
<https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i1.11799>

Pratama, R. H., Hakim, A., & Shobaruddin, M. (2015). *Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik), Elektronik Rukun Tetangga/Rukun Warga (E-Rt/Rw)*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(12), 5.

Ristala, H., & Rahmandika, M. A. (2022). *Penyederhanaan Birokrasi Dan Transformasi Kelembagaan Demi Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Prima Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Beraucrazy Simplification And Institutional Transformastion To Achieve Primary Public Services*. *Jurnal Academia Praja*, 5(1), 10.

Sri Mujiarti Ulfah. (2021). *Agenda Reformasi Birokrasi Untuk Membebaskan Budaya Pungutan Liar*. *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 6(2), 1–8.  
<https://doi.org/10.37304/jispar.v6i2.413>

Yusriadi, Y. (2018). *Reformasi Birokrasi Indonesia: Peluang dan Hambatan*. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 8(2), 178. <https://doi.org/10.31289/jap.v8i2.1824>

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/34006/transformasi-digital-pelayanan-publik-harus-utamakan-kepentingan-publik/0/berita> (diakses 2022)



# **POTRET #III**

**Pemerintahan, Inovasi  
Pelayanan dan Otonomi**



# INOVASI DAERAH DAN GOOD GOVERNANCE

## Catatan untuk Birokrasi yang Gagal *Move on*

Syarifuddin Usman



### Abstrak

Tulisan ini menganalisis keterkaitan inovasi daerah, *good governance*, birokrasi dan pelayanan publik. Tak dimungkiri, bahwa birokrasi memegang peran kunci dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan membangun pelayanan prima melalui inovasi. Inovasi secara esensial berarti memberikan kemudahan, kecepatan, dan keunggulan: mudah bagi pengguna layanan, mudah bagi pelaku, mudah pula bagi tata kelola organisasi. Kemudahan dan kecepatan itulah yang mesti menjadi tujuan penting inovasi. Ada sejumlah catatan tantangan inovasi daerah yang sangat menentukan. *Pertama*, sangat tergantung dari model kepemimpinan untuk menumbuhkan dan mewadahi keberinovasian. *Kedua*, Sumber Daya Manusia (SDM) *Ketiga*, pengetahuan adalah kekuatan. (*Knowledge is Power*). Fasilitasi keterbukaan data dan informasi, yakni pertukaran data dan pengetahuan lintas sector yang digunakan untuk merespons secara kreatif tantangan dan peluang-peluang baru. *Keempat*, Kerja bersama (*working together*) *Kelima*, aturan dan proses harus mendukung, bukan menghambat (*rules and process to support not hinder*). Memastikan bahwa aturan dan proses internal berjalan seimbang antara memitigasi resiko sambil melindungi sumber daya dan upaya menciptakan inovasi. Pelayanan publik merupakan inti dari seluruh proses berpemerintahan memang tidak baik-baik saja di Indonesia umumnya dan Provinsi Maluku Utara khususnya. Pelayanan public merupakan penanda hadirnya Negara (*state in practice*) dalam kehidupan nyata sehari-hari masyarakat.

## A. Pendahuluan

Saat dunia dilanda Pandemi COVID-19 pada akhir 2019 lalu dan masih terasa sampai saat ini meski tak lagi massif seperti pada awal-awal kehadirannya, yang sangat direpotkan adalah birokrasi. Bagaimana tidak, dalam waktu sekejap, pelayanan publik terhenti, karena aktivitas masyarakat dibatasi ruang geraknya melalui kebijakan pembatasan sosial dan mengurangi kontak fisik. Di beberapa Negara bahkan secara ekstrim memperlakukan kebijakan *lockdown*, termasuk Indonesia dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sangat ketat. Masyarakat dunia yang tadinya memiliki mobilitas yang sangat intens disertai dengan pergerakan barang dan jasa tiba-tiba terhenti, mau tak mau harus menyesuaikan kehidupan “baru” seperti *social distancing*, *work from home*, *zoom meeting*, *learning distancing*, serta penyesuaian lainnya yang kemudian menjadi kebiasaan baru. COVID-19 menurut Wawan Mas’udi dan Poppy S. Minarti (2020), melahirkan banyak perubahan norma dan praktik baru dalam semua tatanan. Sosial, politik dan ekonomi dan kebiasaan. Baik pada level individu, komunitas, kelembagaan dan hubungan antar bangsa.

Perubahan dan praktik baru diwujudkan dalam inovasi pelayanan bagi sejumlah daerah di Indonesia. Untuk menyebut beberapa adalah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuat sejumlah aplikasi digital seperti Si Adik, atau sistem informasi layanan pendidikan, yang memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan meski tanpa harus melakukan tatap muka. Bahkan inovasi tersebut sampai pada tingkat pemerintah desa. Seperti Pemerintah Desa Panggungharjo Kabupaten Bantul, merespon Pandemi dengan menginisiasi pembuatan aplikasi daring pelaporan kondisi kesehatan masyarakat melalui riwayat perjalanan. Kemudian membuat situs *pasardesa.id* sebagai ruang publik di dunia maya menggerakkan ekonomi lokal. Ada juga beberapa desa di Kabupaten Banyuwangi dengan memanfaatkan teknologi digital selama situasi pandemik berlangsung. Lewat kebijakan inovasi *smart* kampung

## DAFTAR PUSTAKA

- Anas, Abdullah Azwar, 2020, *Inovasi Banyuwangi, Jalan Terpendek Mencapai Layanan Publik Prima*, Jakarta, KPG
- Albrow, Martin, 2007. *Birokrasi*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Apriliyanti, Indri Dwi, 2020, *Optimisme Melampaui Musibah Pandemi, Antisipasi Kebijakan Publik Pasca Pandemi*, Departemen Manajemen Kebijakan Publik dan Program Studi S2 MKP, Yogyakarta, UGM
- Halim, Farhan Rahmawan, Astuti Feni, Umam Khaerul, *Implementasi Prinsip Agile Governance Melalui Aplikasi PIKOBAR Provinsi Jawa Barat*, *Jurnal Administrasi Publik*, April 2021 Volume 7 no.1, 2021
- Hutagalung, Simon Sumanjaya, Hermawan, Dedy, 2018, *Membangun Inovasi Pemerintah Daerah*, Yogyakarta, Deepublish.
- Katherina, Riris, 2020, *Pelayanan Publik dan Pemerintahan Digital Indonesia*, Jakarta, Yayasan Obor.
- Manaf, Abdul, 2016, *Good Governance dan Pelayanan Publik, Modul Materi*, Jakarta, KPK
- Nurharyoko, Gogor Oko, Pramudita Ayodha, Nugroho RH. Bambang B, 2020, *Inovasi Birokrasi, Membuat kerja Birokrat Lebih Bermakna*, Jakarta, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia)
- Piliang, Yasraf Amir, 2017, *Dunia Yang Berlari, Dromologi, Implosi, Fantasmagoria*, Yogyakarta, Aurora
- Setiyono, Budi, 2012. *Birokrasi Dalam Perspektif Politik dan Administrasi*, Bandung: Nuansa.
- Siagian, Sondang P., 1994. *Patologi Birokrasi: Analisis, Identifikasi dan Terapinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sedarmayanti, 2012 *APU, Good Governance, Pemerintahan yang Baik*, Edisi Revisi, Bandung, Mandar Maju.

Thoha, Miftah. 2000, "Demokrasi Dalam Birokrasi Pemerintah Peran Kontrol Rakyat dan Netralitas Birokrasi," dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar UGM Ilmu-ilmu Sosial, Yogyakarta: UGM Press

Ubaidillah Achmad, *Birokrasi dan Kultur Struktur Rasional Egaliter; Sumbangan Agama untuk kepentingan Good Governance*, Jurnal Millah Vol VII No 1 Agustus 2007

Yuntikasari, Nurlia Sradewi, 2016, *Patologi Birokrasi Dalam Penanganan Perkara di Pengadilan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang* (Skripsi), Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar

### **Sumber Lain**

Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Umum Penilaian Inovasi Daerah dan pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2022 Nomor : 002.6/3780/LITBANG Tanggal : 5 Juli 2022

Jarkasih,A, 2020, *Good Governance*, Makalah (Powerpoint)

[https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Maluku-Utara-Mei-2022.aspx#:~:text=Perkembangan%20Ekonomi%20Daerah,%2C00%25%20\(yoy\) di unduh pada18 Agustus 2022](https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Maluku-Utara-Mei-2022.aspx#:~:text=Perkembangan%20Ekonomi%20Daerah,%2C00%25%20(yoy) di unduh pada18 Agustus 2022)

MalutPost Senin,20 Juni 2022

UU nomor 23 tahun 2014

# PARADIGMA PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU

Kajian Teoritik Analitik

Rahmat Suaib



## A. Pendahuluan

### Otonomi Daerah dan Dinamika Pelayanan Publik

Sejak bergulinya reformasi hingga saat ini, upaya penataan sistem dan struktur organisasi pemerintahan terus dilakukan. Tujuannya tidak lain hanya untuk kembali kepada kondisi ideal sebuah pemerintahan negara yang selama ini dianggap kurang efektif pengelolaannya. Upaya penataan sistem pemerintahan negara bisa kita lihat dari beberapa paket Undang-Undang yang sempat dikeluarkan oleh pemerintah terutama menyangkut dengan Pemerintahan Daerah yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hadirnya undang-undang tersebut dapat memberi harapan besar bagi perbaikan kinerja aparatur pemerintahan daerah. Wujud pemberian kewenangan terhadap daerah melalui otonomi daerah memberi semangat tersendiri untuk mewujudkan pemerintahan yang mampu memberikan layanan secara maksimal kepada rakyat. Pembentukan daerah otonomi baru (otonomi daerah) pada dasarnya bukanlah tujuan melainkan alat untuk mewujudkan demokratisasi, keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di daerah. Demikianlah esensi dari otonomi daerah yang harus kita fahami bersama.

Orde reformasi telah meletakkan perubahan yang sangat mendasar bagi pemerintah daerah kabupaten di Indonesia. Tata kelola pemerintahan yang dahulu cenderung sentralistik mulai diarahkan kepada pemerintahan yang desentralistik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Nurmandi, 2010, *Manajemen Pelayanan Publik*, PT Sinergi Visi Utama Yogyakarta
- Achmad Nurmandi, 2006, *Manajemen Perkotaan. Aktor, Organisasi, Pengelolaan Daerah Perkotaan dan Metropolitan di Indonesia*, Penerbit Sinergi Publishing Yogyakarta
- Agus Dwiyanto, 2010, *Manajemen Pelayanan Publik. Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*, Gadjah Mada University Press
- Agus Pramusinto & Erwan Agus Purwanto, 2009. *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik*. Penerbit Gava Media Yogyakarta
- Agus Pramusinto & Wahyudi Kumorotomo, 2009. *Governance Reform di Indonesia*. Penerbit Gava Media Yogyakarta
- Abdul Gafar Karim, 2011. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*; Penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta
- Akhmad Sukardi, 2009, *Participatory Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, LaksBang Pressindo Yogyakarta
- Amy Y.S. Rahayu, 1997, *Fenomena Sektor Publik dan Era Service Quality, dalam Bisnis dan Birokrasi* No. 1/Vol. III/April/1997.
- Budi Winarno, 2012. *Kebijakan Publik. Teori, Proses, dan Studi Kasus*, Penerbit CAPS (Center for Academic Publishing Service) Yogyakarta
- David Osborne & Ted Gaebler, 2000. *Mewirusahaakan Birokrasi*, PT Pustaka Binaman Pressindo Jakarta
- Dwiyanto Indiahono, 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Penerbit Gava Media Yogyakarta
- Hesti Puspitosari dkk, 2011, *Filosofi Pelayanan Publik*, SetaraPress (kelompok intrans publishing) Malang

- Hardiyansyah, 2011, *Kualitas Pelayanan Publik*. Gava Media Yogyakarta
- Harbani Pasolong, 2010, *Kepemimpinan Birokrasi*, Alfabeta Bandung
- Hanif Nurcholis, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo Anggota IKAPI Jakarta
- H. Mat Syuro, 2009. *Perbandingan Sistem Pemerintahan Lokal*, Pustaka Felicha, Yogyakarta
- I Nyoman Sumaryadi, 2010, *Sosiologi Pemerintahan Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, Ghalia Indonesia Bogor
- Inu Kencana Syafie, 2010, *Ilmu Politik*, PT Rineka Cipta Jakarta
- Inu Kencana Syafie, 2011, *Manajemen Pemerintahan*, Pustaka Reka Cipta Bandung
- J. Kaloh, 2010. *Kepemimpinan Kepala Daerah. Pola Kegiatan, Kekuasaan dan Perilaku Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Sinar Grafika Jakarta
- Lijan Poltak Sinambela, 2007, *Reformasi Pelayanan Publik*, PT Bumi Aksara Jakarta
- Khoirudin, 2005. *Sketsa Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia. Format Masa Depan Otonomi Menuju Kemandirian Daerah*. Penerbit Adverroes Press
- M. Alfian Alfian, 2010, *Pemimpin Yang Pelayan*, Penerbit In-Trans Publishing Malang
- Mas,Ud Said, 2010. *Birokrasi Di Negara Birokratis*, Penerbit UMM Press Malang
- Muhadam Labolo, 2006, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mohammad Khozin, 2010. *Evaluasi Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Gunung*

*Kidul*, Jurnal Studi Pemerintahan, Volume 1/ Nomor 1/Agustus/2010

- Perdana Rahadhan dkk, 2006. *Distribusi Kewenangan Kabupaten-Desa Telaah Kasus Implementasi Otonomi Daerah*; Penerbit Sekretariat Penguatan Otonomi Desa (SPOD) FE Unibraw Malang
- Ratminto & Atik Septi Winarsih, 2012, *Manajemen Pelayanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Surjadi, 2009, *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*, PT Refika Aditama Bandung
- Saiful Arif dkk, 2010, *Reformasi Pelayanan Publik*, Program Sekolah Demokrasi PLACIDS bekerja sama dengan Averroes Press Malang
- Slamet Rosyadi, 2010. *Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*, Gava Media Yogyakarta
- Sondang P. Siagian, 1994. *Patologi Birokrasi. Analisis, Identifikasi dan Terapinya*, Ghalia Indonesia Jakarta
- Tri Ratnawati, 2009. *Pemekaran Daerah. Politik Lokal & Beberapa isu Teseleksi*, Pustaka Pelajar Yogyakarta
- Tangkilisan, 2005. *Manajemen Publik*. Penerbit PT.Grasindo Jakarta
- Utang Rosidin, 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Pustaka Setia Bandung
- Waluyo, 2007. *Manajemen Publik. (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*, Mandar Maju Bandung
- Wahyudi Kumorotomo dkk, 2010. *Reformasi Aparatur Negara Ditinjau Kembali*, Gava Media Yogyakarta
- Wahyudi Kumorotomo, 2008. *Akuntabilitas Birokrasi Publik Sketsa Pada Masa Transisi*, Penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta

Willy R. Tjandra, 2006. *Praxis Good Governance*, Penerbit Pondok Edukasi Bantul Yogyakarta

Yeremias T. Keban, 2008. *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik. Konsep, Terori dan Isu*. Penerbit Gava Media Yogyakarta

UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentan Pemeintahan Daerah

PP Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembangian Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah

# KUALITAS PELAYANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI UPTB SAMSAT KOTA TERNATE

Vivi Noviyanti



## A. Pendahuluan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik menjelaskan pengertian dari Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik yang dimaksud dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pelayanan publik ini menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan khalayak masyarakat ramai yang memiliki keanekaragaman kepentingan dan tujuan. Oleh karena itu institusi pelayanan publik dapat dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Jika pemerintah merupakan organisasi birokrasi dalam pelayanan publik, maka organisasi birokrasi pemerintahan merupakan organisasi terdepan yang berhubungan dengan pelayanan publik.

Dalam hal institusi pemerintah memberikan pelayanan, maka yang terpenting adalah bagaimana memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya.

Suatu pelayanan bermutu yang diberikan kepada masyarakat menuntut adanya upaya dari seluruh pegawai, dan bukan hanya dari petugas di "*Front Office*". Jadi, upaya itu tidak hanya dituntut dari mereka yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam menghasilkan pelayanan yang

## DAFTAR PUSTAKA

- Adya Atep Barata, (2004). Dasar-dasar Pelayanan Prima Cetakan 2 .  
Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Hardiyansyah, 2011. Kualitas Pelayanan Publik. Gava Media.  
Yogyakarta.
- Pasolong, Harbani,2010 Teori Administrasi Publik. Alfabeta  
Bandung
- Undang-undang nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Undang-undang nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan  
Retribusi Daerah.
- Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan  
Daerah.
- Catatan akhir Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku  
Utara Tahun 2018.
- <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>, diakses tanggal 20  
Februari 2020.

# SOFIFI DAN IMAJINASI JAKARTA

## Diskursus Pengembangan Sofifi

### Sebagai Kawasan Khusus

Ali Lating



#### A. Pendahuluan

Sejak dimekarkan dari provinsi Maluku tahun 1999, Maluku Utara menjadi provinsi baru seiring dengan reformasi yang berdampak pada berbagai perubahan. Pada level yang paling dasar reformasi merubah format relasi negara yang sejak kemerdekaan memperlihatkan watak sentralistik. Posisi negara sangat kuat dengan presiden sebagai pemegang kendali kekuasaan (*strong eksekutif*) struktur pemerintahan terkomando secara sistemik, ruang demokrasi mengalami stagnasi, masyarakat civil (*civil society*) tidak bebas, pasif dalam merespon berbagai kebijakan pemerintah dan tidak otonomi. (Linz, 2001). Demokrasi tidak terkonsolidasi akibat authoritarianisme yang dipelihara secara sistemik yang ditopang oleh lembaga strategis yang terkooptasi. Ruang demokrasi menemukan urgensinya ketika dinamika politik mengalami perubahan seiring dengan reformasi yang bergulir awal 1998. Perubahan signifikan diberbagai aspek termasuk relasi pusat daerah dengan adanya perubahan kebijakan termasuk kebijakan otonomi daerah<sup>1</sup>. Ruang demokrasi yang terbuka juga tidak disia-siakan para *stakeholder* Maluku Utara dari berbagai elemen untuk memperjuangkan pemekaran daerah melepaskan diri dari Provinsi Maluku.

Pada tanggal 4 Oktober DPR RI menetapkan UU No 46 Tahun 1999 sebagai landasan Provinsi otonom. Kurang lebih 11

---

<sup>1</sup> Reformasi melahirkan perubahan dalam kebijakan relasi Jakarta dan daerah daerah dalam hal kewenangan misalnya perubahan Undang-Undang No 5 Tahun 1974 yang sangat sentralistik menjadi Undang – Undang No 22 Tahun 1999 yang lebih terdesentralisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dita Angga Rusiana. 2022. 22 Tahun Alot, Sofifi Bakal Dijadikan Kawasan Khusus Ibu Kota Maluku Utara. Retrieved. 03- 8-2022. From,<https://nasional.sindonews.com/read/444542/12/22-tahun-alot-sofifi-bakal-dijadikan-kawasan-khusus-ibu-kota-maluku-utara-1622653606>
- Gunawan Tauda. 2022.Pengembangan Sofifi Tak Pasti.Malut Post 9 Juni.
- Juan Linz. Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat Mizan. Bandung. 2001.
- Gubernur Malut Hadiri Finalisasi Draft Kawasan Khusus Dengan Tim Kemendagri. Retrieved .8-8-2022. From. <https://www.malutprov.go.id/gubernur-malut-hadiri-finalisasi-draft-kawasan-khsusus-dengan-tim-kemendagri>
- Langkah Strategi Kemendagri Atasi Permasalahan Ibu Kota Maluku Utara, Sofifi. Retrieved, 06-8-2022, from, <https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/berita/detail/langkah-strategis-kemendagri-atasi-permasalahan--ibu-kota-maluku-utara-sofifi->
- Mewujudkan kesamaan persepsi pembentukan kawasan Khusus ibukota Provinsi Gubernur Maluku Utara Temui Sultan Tidore. Retrieved, 6-8-2022. From. <https://www.malutprov.go.id/mewujudkan-kesamaan-persepsi-pembentukan-kawasan-khusus-ibukota-sofifi-gubernur-maluku-utara-temui-sultan-tidore>
- Ngofa Adat Kesultanan Tidore Tolak Kawasan Khusus Kota Sofifi Sebagai DOB.Retrieved,9-8.2021. From.<https://cerminhalmahera.com/ngofa-adat-kesultan-tidore-tolak-kawasan-khusus-kota-sofifi-sebagai-dob/>

Pembatalan Kawasan Khusus Saran Mensesneg. Retrieved. 9-8-2022.  
From <https://harianhalmahera.com/maluku-utara/pembatalan-kawasan-khusus-saran-mensesneg/>

Rakor Pembahasan Percepatan Pembangunan Strategis Kawasan Khusus Ibu Kota Sofifi. Retrieved. 8-8-2022. From, <https://www.aktualdetik.com/berita/4772/rakor-pembahasan-percepatan-pembangunan-strategis-kawasan-khusus-ibu-kota-sofifi.html>

Kawasan Khusus Kota Sofifi Diatur Dalam PP, Rancang Rp 15 T Di 3 Kecamatan. Retrieved, 9-9-2022. From. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/537336/kawasan-khusus-kota-sofifi-diatur-pp-rancang-rp15-t-di-3-kecamatan>

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, F., & Sadat, A, 2020, Model Pelayanan Publik Terhadap Reformasi Birokrasi. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 16-25. <https://doi.org/10.35326/Jsip.V1i1.525>
- Abdilah S., Ubed, 2002. *Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*, Magelang: Indonesiatara.
- Abed, George T., and Gupta, Sanjeev, 2002, *Governance, Corruption & Economic Performance*, IMF: Washington, D.C.
- Adnan, M. F., 2014, Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik. *Humanus*, 12(2), 196. <https://doi.org/10.24036/jh.v12i2.4038>
- Adya Atep Barata, 2004, *Dasar-dasar Pelayanan Prima* Cetakan 2 . Elex Media Komputindo. Jakarta Agung, Ide Anak Agung Gde, *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985).
- Ahmad, Saiful, *Politik dan Etnik: Studi Kasus Konflik Politik dalam Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2007*, (Jakarta: Program Pascasarjana FISIP UI, 2012, disertasi).
- Akbar, G. G., Rulandari, N., & Widaningsih, W. (2021). Reformasi Birokrasi Di Indonesia, Sebuah Tinjauan Literatur. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(2), 187-199. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v4i2.1981>
- Alfian, M. Alfian, 2010, *Pemimpin Yang Pelayan*, Penerbit In-Trans Publishing Malang
- Amal, Ichlasul, "Teori-teori Mutakhir Partai Politik", Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1996.
- Amal, M. Adnan, *Maluku Utara : Perjalanan Sejarah 1250-1800*, Jilid I, (Ternate: Universitas Khairun, 2002).

- Amy Y.S. Rahayu, 1997, Fenomena Sektor Publik dan Era Service Quality, dalam Bisnis dan Birokrasi No. 1/Vol. III/April/1997.
- Anas, Abdullah Azwar, 2020, Inovasi Banyuwangi, Jalan Terpendek Mencapai Layanan Publik Prima, Jakarta, KPG
- Alamsyah, 2003. Politik Dan Birokrasi: Reposisi Peran Birokrasi Publik dalam Proses Politik Lokal. Dipresentasikan Dalam Seminar Birokrasi, S2 Ilmu Administrasi Negara, Universitas Gadjah Mada, 1, 50-77.
- Albrow, Martin, 2007. Birokrasi, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Anderson, Benedict, ed, 2001, Violence and the State in Suharto's Indonesia, Ithaca: Southeast Asia Program, Cornell University.
- Apriliyanti, Indri Dwi, 2020, Optimisme Melampaui Musibah Pandemi, Antisipasi Kebijakan Publik Pasca Pandemi, Departemen Manajemen Kebijakan Publik dan Program Studi S2 MKP, Yogyakarta, UGM
- Arifah, U., 2020, Transformasi Birokrasi Melalui E-Government. Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan studi sosial, 4(2), 30-41. <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v4i2.245>
- Arif, Saiful dkk, 2010, Reformasi Pelayanan Publik, Program Sekolah Demokrasi PLACIDS bekerja sama dengan Averroes Press Malang
- Arsad, Iksan R.A., 2011, Budaya Pemerintahan: dari Maluku Utara untuk Kybernologi Ternate, UMMU Press.
- Aspinall, Edward dan Marcus Mietzner, Problems of Democratisation in Indonesia. Singapore: ISEAS: 75-99.
- Bailey, Stephen J., 1999, Local Government Economics: Principles and Practice, Macmillan Press Ltd.: London.

- Bird, Richard M. dan Vaillancourt, Francois, 2000, *Desentralisasi Fiskal di Negara-negara Berkembang*, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991).
- Budiardjo Miriam, 2008, *“Dasar-dasar Ilmu Politik”*, Gramedia, Jakarta.
- Cipto Bambang, 1996, *“Prospek dan Tantangan Partai Politik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Cho, Chang-hyun, and Meinardus, 1996, *Local Autonomy and Local Finance*, CLAHanyang University: South Korea.
- Danandjaja, Andreas A., 1986, *Sistem Nilai Manajer Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Binaman Presindo.
- Davey, K.J., 1988, *Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*, UI Press: Jakarta
- Diana, B. A., 2020. Pengaruh Politik Dalam Birokrasi Pemerintahan. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 2(1), 1-7. <https://doi.org/10.15575/jbpd.v2i1.7585>
- Dwiyanto, Agus, 2010, *Manajemen Pelayanan Publik. Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*, Gadjah Mada University Press
- Erawan, I Ketut Putra, 2004 *“Mission of Possible?; Reformasi Kepartaian di Indonesia*, Makalah, tidak dipublikasikan.
- Emanratu, P. F, 2021. *Birokrasi Kabupaten Kepulauan Tanimbar Sebagai Gelanggang Patronase*. <https://doi.org/10.31237/osf.io/f6bj2>
- Fatum, H., Bazarah, J., & Ahmad, J., 2021, *Konsep Pelayanan Publik Di Indonesia (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia)*. *DEDIKASI*, 22(2), 105. <https://doi.org/10.31293/ddk.v22i2.5860>

- Firdaus, S. U. T., & Hasbullah, H., 2020, "Revolusi Mental" Birokrasi Di Indonesia: Good Governance. PUBLIC CORNER, 14(2), 13-25. <https://doi.org/10.24929/fisip.v14i2.889>
- Gaffar Afan, 2006 "Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi", Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gedeona, H. T, 2013. Birokrasi Dalam Praktiknya Di Indonesia: Netralitas Atau Partisan? Jurnal Ilmu Administrasi, 10(02), 14.
- Giddens, Anthony, 2000. Jalan Ketiga, Pembaruan Demokrasi Sosial, terj. Ketut Arya Mahardika, Jakarta: Gramedia Pustaka
- Haboddin Muhtar dan Gregorius Syahdan, "Evaluasi Pilkada di Indonesia" IPD-KAS, Yogyakarta, 2009.
- Halim, Farhan Rahmawan, Astuti Feni, Umam Khaerul, Implementasi Prinsip Agile Governance Melalui Aplikasi PIKOBAR Provinsi Jawa Barat, Jurnal Administrasi Publik, April 2021 Volume 7 no.1, 2021
- Haryanto, "Partai Politik Suatu Tinjauan Umum", Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Hardiyansyah, 2011. Kualitas Pelayanan Publik. Gava Media. Yogyakarta.
- Hardjosoekarto, 2002, Hubungan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Jurnal Administrasi Negara Vol. II No. 2
- Hardiyansyah, 2011, Kualitas Pelayanan Publik. Gava Media Yogyakarta
- HM, P. & Hapsa, 2019, Praktik Patronase Politik Di Indonesia Pasca Reformasi Dan Upaya Mengatasinya. Jurnal Majelis.
- Hoefstede, Gert, 2018, Culture's Consequences International Differences in Work-related Values, (California: Sage Publ, Beverly Hills.

- Hutagalung, Simon Sumanjaya, Hermawan ,Dedy, 2018, Membangun Inovasi Pemerintah Daerah, Yogyakarta, Deepublish.
- Ibrahim, Halil Abd Hi, and Supriatna Tjahja, 2019, "Epistemologi Pemerintahan, Paradigma Manajemen, Birokrasi Dan Kebijakan Pulik." Yogyakarta, Gramasurya
- Ibrahim, Abdul Halil Hi.2017, "Influence of Political Parties, Bureaucracy Authority, Role of Election Supervisory Committee and Community Participation on the Performance of General Elections Commission."
- Indiahono, Dwiyanto, 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis, Penerbit Gava Media Yogyakarta
- Irawan, B., & Saputro, A., 2021, Penerapan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Melalui Web Domain Di Kota Surakarta. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 6(2), 59–67. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v6i2.4386>
- Ishiyama, John T., dan Marijke Breuning (eds),2013, Ilmu Politik dalam Paradigma Abad ke-21: Sebuah Referensi Panduan Tematis, (pen. Ahmad Fedyani Syaifuddin), Jakarta, Kencana.
- Juan Linz. 2001, Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat Mizan. Bandung
- Karim, Abdul Gafar, 2011. Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia; Penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta
- Katherina, Riris, 2020, Pelayanan Publik dan Pemerintahan Digital Indonesia,Jakarta, Yayasan Obor.
- Kaloh, J., 2010. Kepemimpinan Kepala Daerah. Pola Kegiatan, Kekuasaan dan Perilaku Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Sinar Grafika Jakarta

- Keban, Yeremias T., 2008. Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik. Konsep, Terori dan Isu. Penerbit Gava Media Yogyakarta
- Koirudin,2004, "Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi", Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Khoirudin, 2005. Sketsa Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia. Format Masa Depan Otonomi Menuju Kemandirian Daerah. Penerbit Adverroes Press
- Khozin, Mohammad, 2010. Evaluasi Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Gunung Kidul, Jurnal Studi Pemerintahan, Volume 1/ Nomor 1/Agustus/2010
- Kumorotomo, Wahyudi dkk, 2010. Reformasi Aparatur Negara Ditinjau Kembali, Gava Media Yogyakarta
- Kumorotomo, Wahyudi, 2008. Akuntabilitas Birokrasi Publik Sketsa Pada Masa Transisi, Penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta
- Kusuma, T. P., Setyadi, D. S., Andaru, I. W., & Roziqin, A. (2022). Reformasi Birokrasi Dalam Aspek Efisiensi Dan Transparansi Pada Pelayanan Birokrasi Pemerintahan Kota Batu. AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 7(1), 1. <https://doi.org/10.31602/as.v7i1.5160>
- Labolo, Muhadam, 2006, Memahami Ilmu Pemerintahan, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Laode Ida, 2005, Permasalahan Pemekaran Daerah di Indonesia, Media Indonesia
- Lay Cornelis,2008, "Involusi Politik; Esai-esai Transisi Indonesia", Program Pasca Sarjana (S2) PLOD UGM, Yogyakarta.
- Lay Cornelis, 1997,"Rekrutmen Elit Politik", dalam Prisma No.4,LP3ES,Jakarta

- Leirissa, R.Z., Adrian B. Lopian, Uka Tjandrasasmita, M. Saleh Putuhena, Abd. Rahman Marasabessy, Mudaffar Syah, Jusuf Abdulrahman, Kasijanto, Titik Pujiastuti, E.K.M. Masinambow, J.W. Ajawaila dan Herry RD. Nachrawy, Ternate: Bandar Jalur Sutera, (Jakarta: Kerjasama Penerbit Lintas, Yayasan Adikarya IKAPI Program Pustaka III - The Ford Foundation, 2001).
- Mahfud, MD, 2001 *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, PT. RinekaCipta, Jakarta,
- Marijan, Kacung, 2006 "Demokratisasi di Daerah (Pelajaran Dari Pilkada Langsung)", Pustaka Eureka, Surabaya.
- Manaf, Abdul, 2016, *Good Governance dan Pelayanan Publik, Modul Materi*, Jakarta, KPK
- Mas'ood, Mochtar dan Colin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1997).
- Minan, A, 2020, *Netralitas birokrasi Dan Abuse Of Power Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Kajian Hukum Penerapan Pasal 71 UU Nomor 1 tahun 2015 Dalam pemilihan Kepala Daerah. Jurnal Keadilan Pemilu, 1, 37-52.*
- Mubarak, M. Zaki, 2006. *Blue Print Otonomi Daerah Indonesia*. Jakarta, Yayasan Harkat Bangsa (The YHB Center).
- Noor, Firman, *Perilaku Politik Pragmatis dalam Kehidupan Politik Kontemporer: Kajian atas Menyurutnya Peran Ideologi Politik di Era Reformasi*, dalam *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 40 (1), Juni 2014.
- Nurcholis, Hanif, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo Anggota IKAPI Jakarta
- Nuraini, H, 2017, *Birokrasi, Kekuasaan Dan Bisnis*. 5(1), 5.
- Nurmandi, Achmad 2010, *Manajemen Pelayanan Publik*, PT Sinergi Visi Utama Yogyakarta

- 2006, Manajemen Perkotaan. Aktor, Organisasi, Pengelolaan Daerah Perkotaan dan Metropolitan di Indonesia, Penerbit Sinergi Publishing Yogyakarta
- Nurharyoko, Gogor Oko, Pramudita Ayodha, Nugroho RH. Bambang B, 2020, Inovasi Birokrasi, Membuat kerja Birokrat Lebih Bermakna, Jakarta, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia)
- Ode Wahiyuddin, L., 2022, Perjalanan Politik Birokrasi Di Indonesia: (Kajian Teori dan Analisis Konsep). Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal, 2(1), 44-54. <https://doi.org/10.51454/parabela.v2i1.510>
- Osborne, David & Gaebler Ted, 2000. Mewirausahakan Birokrasi, PT Pustaka Binaman Pressindo Jakarta
- Pamungkas Sigit, 2011 "Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia", Institute for Democracy and Welfarism, Yogyakarta.
- Pasolong, Harbani, 2010, Kepemimpinan Birokrasi, Alfabeta Bandung
- Pasolong, Harbani, 2010 Teori Administrasi Publik. Alfabeta Bandung
- Parjaman, T., Soedarmo, U. R., & Enas. (2019). Penguatan Kapasitas Aparatur Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah Di Era Global. *Journal of managementReview*, 1, 29-42.
- Paskarina, C, 2017, Menundukkan Birokrasi: Melacak Pertarungan Kuasa Dibalik Wacana Reformasi Birokrasi. *CosmoGov*, 1(1), 71. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i1.11799>
- Perdana, G., 2019, Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi (Protecting The ASN Neutrality From Bureaucracy Politicization). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 10(1), 109-128. <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1177>

- Piliang, Yasraf Amir, 2017, *Dunia Yang Berlari, Dromologi, Implosi, Fantasmagoria*, Yogyakarta, Aurora
- Pratama, R. A., 2017,. *Patronase Dan Klientalisme Pada Pilkada Serentak Kota Kendari Tahun 2017*. *Jurnal Wacana Politik*, 2(1), 12.
- Prayitno, B.,2011, *Birokrasi Dan Politik : Problematika Dalam Keniscayaan Administrasi Publik*. *Jurnal Wacana Kinerja*, 14(1), 17.
- Pramusinto, Agus & Purwanto, Erwan Agus, 2009. *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik*. Penerbit Gava Media Yogyakarta
- Pramusinto, Agus & Kumorotomo,Wahyudi, 2009. *Governance Reform di Indonesia*. Penerbit Gava Media Yogyakarta
- Pratama, R. H., Hakim, A., & Shobaruddin, M. (2015). *Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik), Elektronik Rukun Tetangga/Rukun Warga (E-Rt/Rw)*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(12), 5.
- Puspitosari, Hesti et.al, 2011, *Filosofi Pelayanan Publik*, SetaraPress (kelompok intrans publishing) Malang
- Radjiloen, L., *Dataran Tinggi Foramadiah adalah Ternate Awal ke Dataran RendahLimau Jore-Jore sebagai Ternate Akhir,(Ternate: Seksi Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Utara, 1982, terbatas)*.
- Rahadhan, Perdana et.al, 2006. *Distribusi Kewenangan Kabupaten-Desa Telaah Kasus Implementasi Otonomi Daerah*; Penerbit Sekretariat Penguatan Otonomi Desa (SPOD) FE Unibraw Malang
- Rakhmawanto, A.,2020, *Analisis Politisasi Birokrasi Dalam Pembinaan Aparatur Sipil Negara*. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 14, 12.

- Ranney, Austin. 1993. *Governing, An Introduction to Political Science*, (New Jersey: Prentice-Hall International, Inc, 1993).
- Ranney, B.H,1981, "Political and Voters, New York.
- Ratminto & Winarsih, Atik Septi, 2012, *Manajemen Pelayanan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta*
- Ratnawati, Tri, 2009. *Pemekaran Daerah. Politik Lokal & Beberapa isu Teseleksi*, Pustaka Pelajar Yogyakarta
- Richards S. Katz dan William Crotty, 2006, "Handbook Party Politics".
- Ristala, H., & Rahmandika, M. A. (2022). Penyederhanaan Birokrasi Dan Transformasi Kelembagaan Demi Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Prima Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Beraucracy Simplification And Institutional Transformastion To Achieve Primary Public Services. *Jurnal Academia Praja*, 5(1), 10.
- Rosidin, Utang, 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Pustaka Setia Bandung
- Rosyadi, Slamet, 2010. *Paradigma Baru Manajemen Pembangunan, Gava Media Yogyakarta*
- Sahdan Gregorius dan Haboddi Muhtar,2009, "Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia" *The Indonesia Power for Democracy (IPD)*, Yogyakarta.
- Said, Mas,Ud, 2010. *Birokrasi Di Negara Birokratis*, Penerbit UMM Press Malang
- Sarnawa, B.,2018, Pergeseran Aturan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Media Hukum*, 25(2). <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0113.181-189>
- Sartori Giovanni,1976,"Parties and Party Systems" a frame work for analysis, Cambridge University Press, 1976.

- Sedarmayanti, 2012 *APU, Good Governance, Pemerintahan yang Baik*, Edisi Revisi, Bandung, Mandar Maju.
- Setiyono, Budi, 2012. *Birokrasi Dalam Perspektif Politik dan Administrasi*, Bandung: Nuansa.
- Siagian, Sondang P., 1994. *Patologi Birokrasi: Analisis, Identifikasi dan Terapinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sinambela, Lijan Poltak, 2007, *Reformasi Pelayanan Publik*, PT Bumi Aksara Jakarta
- Sugiharto, I.,2019, *Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah*. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 18(1). <https://doi.org/10.31941/pj.v18i1.1086>
- Sukardi, Akhmad, 2009, *Participatory Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, LaksBang Pressindo Yogyakarta
- Sumaryadi, I Nyoman, 2010, *Sosiologi Pemerintahan Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, Ghalia Indonesia Bogor
- Surbakti Ramlan,1992, “ *Memahami Ilmu Politik*”, Grasindo, Jakarta.
- Surjo, et.al, 2001, *Agama dan Perubahan Sosial: Studi tentang Hubungan antara Islam, Masyarakat, dan Struktur Sosial-Politik Indonesia*, (Yogyakarta; Universitas Gadjah Mada Press.
- Surjadi, 2009, *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*, PT Refika Aditama Bandung Syah, Mudafar,1996, “*Lingkungan Hukum Adat Ternate*”, (Ternate: Keraton Ternate, 1996, terbatas).
- Syafie, Inu Kencana, 2010, *Ilmu Politik*, PT Rineka Cipta Jakarta

- Syafie, Inu Kencana, 2011, *Manajemen Pemerintahan*, Pustaka Reka Cipta Bandung
- Syuro, H. Mat, 2009. *Perbandingan Sistem Pemerintahan Lokal*, Pustaka Felicha, Yogyakarta
- Tangkilisan, 2005. *Manajemen Publik*. Penerbit PT.Grasindo Jakarta
- Thoha, Miftah. 2000, "Demokrasi Dalam Birokrasi Pemerintah Peran Kontrol Rakyat dan Netralitas Birokrasi," dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar UGM Ilmu-ilmu Sosial, Yogyakarta: UGM Press
- Tjandra, Willy R., 2006. *Praxis Good Governance*, Penerbit Pondok Edukasi Bantul Yogyakarta
- Ubaidillah Achmad, *Birokrasi dan Kultur Struktur Rasional Egaliter; Sumbangan Agama untuk kepentingan Good Governance*, *Jurnal Millah* Vol VII No 1 Agustus 2007
- Ufen, Andreas, 1998, *Electoral Campaigning in Indonesia: The Professionalization and Commercialization after 1998*, in *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 29, 4, 11-37.
- Ulfah, Sri Mujiarti, 2021. *Agenda Reformasi Birokrasi Untuk Membebaskan Budaya Pungutan Liar*. *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 6(2), 1-8. <https://doi.org/10.37304/jispar.v6i2.413>
- Van Klinken, Gerry, 2007, "Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia, Jakarta, KITLV-Yayasan Obor Indonesia,
- Waluyo, 2007. *Manajemen Publik*. (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah), Mandar Maju Bandung
- Winarno, Budi, 2012. *Kebijakan Publik. Teori, Proses, dan Studi Kasus*, Penerbit CAPS (Center for Academic Publishing Service) Yogyakarta

Yudiatmaja, W. E, 2015, Politisasi Birokrasi; Pola Hubungan Politik dan Birokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 19.

Yuntikasari, Nurlia Sradewi, 2016, Patologi Birokrasi Dalam Penanganan Perkara di Pengadilan Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang (Skripsi), Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar

Yusriadi, Y. (2018). Reformasi Birokrasi Indonesia: Peluang dan Hambatan. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 8(2), 178. <https://doi.org/10.31289/jap.v8i2.1824>

### **Sumber Lain; UU, Peraturan Menteri, Internet, Koran**

Bahan Bacaan Utama Mata Kuliah, Partai Politik, Pemilu dan Legislasi Daerah, S2 PLOD UGM Angkatan XVI, 2006

Catatan akhir Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.

<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>, diakses tanggal 20 Februari 2020.

Dita Angga Rusiana. 2022. 22 Tahun Alot, Sofifi Bakal Dijadikan Kawasan Khusus Ibu Kota Maluku Utara. Retrieved. 03- 8- 2022.

From, <https://nasional.sindonews.com/read/444542/12/22-tahun-alot-sofifi-bakal-dijadikan-kawasan-khusus-ibu-kota-maluku-utara-1622653606>

Gubernur Malut Hadiri Finalisasi Draft Kawasan Khusus Dengan Tim Kemendagri. Retrieved .8-8-2022. From. <https://www.malutprov.go.id/gubernur-malut-hadiri-finalisasi-draft-kawasan-khsusus-dengan-tim-kemendagri>

Edaran Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Umum Penilaian Inovasi Daerah dan pemberian Penghargaan Innovative

Government Award (IGA) Tahun 2022 Nomor :  
002.6/3780/LITBANG Tanggal : 5 Juli 2022

Jarkasih,A, 2020, Good Governance, Makalah (Powerpoint)

Laporan Hasil Investigasi di Kabupaten Halmahera Tengah terkait  
Sengketa Batas Daerah Antara Kab. Halmahera Timur dan  
Kab. Halmahera Tengah, yang dilakukan Kesbangpol dan  
Linmas Provinsi Maluku Utara, pada tanggal 3 Juli 2015

Kawasan Khusus Kota Sofifi Diatur Dalam PP, Rancang Rp 15 T Di  
3 Kecamatan. Retrieved, 9-9-  
2022.From.<https://infopublik.id/kategori/nusantara/537336/kawasan-khusus-kota-sofifi-diatur-pp-rancang-rp15-t-di-3-kecamatan>Langkah Strategi Kemendagri Atasi  
Permasalahan Ibu Kota Maluku Utara,Sofifi. Retrieved, 06-8-  
2022, from, <https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/berita/detail/langkah-strategis-kemendagri-atasi-permasalahan--ibu-kota-maluku-utara-sofifi->

Mewujudkan kesamaan persepsi pembentukan kawasan Khusus  
ibukota Provinsi Gubernur Maluku Utara Temui Sultan  
Tidore. Retrieved, 6-8-2022. From. <https://www.malutprov.go.id/mewujudkan-kesamaan-persepsi-pembentukan-kawasan-khusus-ibukota-sofifi-gubernur-maluku-utara-temui-sultan-tidore>

Ngofa Adat Kesultanan Tidore Tolak Kawasan Khusus Kota Sofifi  
Sebagai DOB. Retrieved, 9-8.2021. From.<https://cerminhalmahera.com/ngofa-adat-kesultanan-tidore-tolak-kawasan-khusus-kota-sofifi-sebagai-dob/>

PembatalanKawasanKhususSaranMensesneg.Retrieved.9-8-2022.  
From <https://harianhalmahera.com/maluku-utara/pembatalan-kawasan-khusus-saran-mensesneg/>

Rakor Pembahasan Percepatan Pembangunan Strategis Kawasan  
Khusus Ibu Kota Sofifi. Retrieved. 8-8-2022. From,  
<https://www.aktualdetik.com/berita/4772/rakor->

pembahasan-percepatan-pembangunan-strategis-kawasan-khusus-ibu-kota-sofifi.html

<https://www.antaraneews.com/berita/569442/kemendagri-tetapkan-tapal-batas-haltim-halteng>,

<http://beritasore.com/2007/12/10/depdagri-11-provinsi-yang-menyelesaikan-batasdaerah/Depdagri: 11 Provinsi Yang Menyelesaikan Batas Daerah Posted by Redaksi on Desember 10, 2007>

<https://menpan.go.id/site/berita-terkini/pilkada-2020-menteri-tjahjo-tegaskan-hak-politik-asn-hanya-di-bilik-suara>

[https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Maluku-Utara-Mei-2022.aspx#:~:text=Perkembangan%20Ekonomi%20Daerah,%2C00%25%20\(yoy\) diakses pada18 Agustus 2022](https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Maluku-Utara-Mei-2022.aspx#:~:text=Perkembangan%20Ekonomi%20Daerah,%2C00%25%20(yoy) diakses pada18 Agustus 2022)

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/34006/transformasi-digital-pelayanan-publik-harus-utamakan-kepentingan-publik/0/berita> (diakses 2022)

Undang-undang nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-undang nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentan Pemeintahan Daerah

PP Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Malut Post 9 Juni.

MalutPost Senin,20 Juni 2022

## INDEKS

### A

Abdul Gani Kasuba, 32, 41,  
43, 44, 45, 47, 66, 285  
*Accountability*, 194  
Adriansyah, 174  
*Agile*, 210  
Agus Dwiyanto, 144, 218,  
228, 229, 254  
Ahmad Hidayat Mus, 29, 30,  
31, 34, 38, 40, 41, 42, 47  
Al Gore, 188  
Al Yasin Ali, 65, 66  
Alamsyah, 114, 135, 298  
Albrow, 183, 184, 215, 298  
Alfian, 221, 256, 297  
Almond, 21  
AMAN, 71  
*Assurance*, 250, 264, 270, 271,  
272, 274, 275, 276, 277

### B

*Back Office*, 259  
Banyuwangi, 173, 182, 208,  
209, 215, 298  
*Baron de Grimm*, 183  
BBNKB, 260, 262  
Benedict R.O'G. Anderson,  
27  
Benny Laos, 30  
*big data*, 174, 203, 206  
*bobaso*, 25  
BUMN, 246, 258  
*Bureaucracy*, 16, 136, 301, 305

### C

*Cartel Party*, 85

*Catch-All Party*, 85  
Chris Skelcher, 223  
*civil society*, 279  
*Classic Cadre Party*, 84, 85  
*closed recruitment*, 92, 93, 94  
Cornelis Ley, 247  
COVID-19, 172, 174, 210  
*Customer*, 224

### D

Davidow, 225  
De Vrye, 225

### E

*Effectiveness*, 194, 319  
*Efficiency*, 194  
Emmette S. Redford, 5  
*Empathy*, 264, 271, 272, 274,  
276, 277

### F

Fadel Muhammad, 248  
Fitsimmons, 224  
*Franchise*, 242  
Frank J. Goodnow, 113  
*Front Office*, 259

### G

Gaebler, 219, 254, 304  
Gedeona, 128, 135, 300  
*good governance*, 160, 171, 186,  
187, 188, 189, 190, 196, 197,  
204, 207  
*Governance*, 15, 166, 182, 190,  
192, 195, 196, 215, 216, 248,  
254, 257, 297, 300, 303, 305,  
307, 308, 310, 320  
*Grant*, 243  
*grass root*, 43

## TENTANG PENULIS

### **Dr. Abdul Halil Hi. Ibrahim Tjan, M.Si.**



#### **Dr. Abdul Halil Hi. Ibrahim Tjan, M.Si.**

Lahir di Tobelo, 10 Agustus 1972, Anak Ke-9 dari 11 bersaudara, Ayahnya Hi. Ibrahim Tjan Bin Hi. Abdullah Tjan Hoat Seng, Ibunya Bernama Tjili Muhammad Said Tjan. Menyelesaikan Pendidikan S1 di IAIN Alauddin Ujung Pandang di Ternate (Thn 1996), S2 Ilmu Pemerintahan di Universitas Satyagama (USG) Jakarta (Thn 2002) dan memperoleh gelar Doktor (Dr) Ilmu Pemerintahan di Universitas Satyagama (USG) Jakarta (Thn 2017). Mengabdikan Diri di amal usaha Muhammadiyah yakni sebagai Dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate sejak tahun 2003 sampai sekarang, dan sebagai Dosen Pascasarjana UMMU, adapun jabatan yang pernah dijalani : Ketua Program Studi Ilmu Politik, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, Dekan FISIP UMMU (2006-2010), Ketua Penjaminan Mutu FISIP UMMU, Ketua Tim Penyusunan Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (2018), Direktur Program Pascasarjana UMMU (2018-2022), Direktur Pusat Studi Pemerintahan daerah (PSPD) FISIP UMMU dan sekarang diamanahkan sebagai Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Riset, Pengabdian, Publikasi dan HAKI Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Masa Jabatan 2022-2026., Menikah dengan Rusmiyanti Masuku, SKM dan dikaruniai empat orang anak, Yaitu : Gibran Chalil Tjan (2004), Ghadiza Chalil Tjan (2006), Ghifar Chalil Tjan (2010) dan Gherhana Chalil Tjan (2015).-

Penulis juga mempunyai sejumlah pengalaman, diantaranya : Anggota Tim Pembahasan Penyerahan sebagian Kewenangan Walikota Ternate pada Pemerintah Kecamatan (2005), Sebagai Sekretaris TIM Pendiri Pascasarjana (S2) UMMU Tahun 2007,

Menjadi Nara Sumber pada Kegiatan Kesbangpol Provinsi Maluku Utara tahun 2010, Tim Ahli Penyusunan Naskah RPJMD Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012, Menjadi Tim Seleksi KPU Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013, Ketua FKDM Kota Ternate Tahun 2015, Tim Kajian Harmonisasi Ranperda inisiatif DPRD Kota Ternate (2017), Ketua TIM Pembuatan Naskah Akademik PERDA disejumlah Kabupaten di Provinsi Maluku Utara, Tenaga Ahli dan Nara sumber Forum Pengembangan Ekonomi Lokal Kota Ternate Tahun 2019, Anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Ternate Tahun 2019, TIM Peneliti di BAPPELITBANGDA Kota Ternate, Penelitian tentang Kualitas Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2019, Tim Ahli Penyusunan Naskah RPJMD Pemerintah Kota Ternate, Mengikuti Training Of Trainer (TOT) Persiapan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Oleh KPK RI dan LLDIKTI Wil XII Tahun 2019, Asesor Penilaian Beban Kerja Dosen Dalam Lingkungan LLDIKTI Wilayah XII, Nara sumber pada berbagai seminar dan kegiatan Pemerintahan., Mengikuti Leadership Training Nasional Pimpinan PTM Angkatan Ke-3 Yogyakarta Tahun 2019, Ketua TIM Kajian Pembuatan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020, Panelis Debat Kandidat Bakal Calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020, Sebagai Penanggungjawab Program Detasering Kemendikbud RI Pada Kegiatan Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Perguruan Tinggi dan Rencana Operasional (Renop) Perguruan Tinggi, Khususnya di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate Tahun 2020, Tim Penyusun Rencana Strategi (RENSTRA) Bisnis Universitas Muhammadiyah Maluku Utara 2021-2025.

Beberapa Article yang telah di Publis Pada jurnal Internasional terindex Scopus : *Effect Of Public Participation To Improve The Election Commission (KPU) Performance In Ternate City Mayor Election* (2018), *The Role of Political Parties on Election Commission Performance in 2015 Mayor Election of Ternate City* (2018), *Elite Conflict on Power Contestation of Internal Political Party* (2018),

*Study On Elite Configuration In Obi Regency Extension Of North Maluku (2018), The Implementation Of Policy On Expansion Development Of Employment Opportunities For Productive Workforce In Tidote City (2018), Government Performance On Property Tax Services Of Rural And Urban Areas In Ternate City (2018), Jailolo Bay Festival As A Model For Developing Cultural Tourism In West Halmahera (2018), The Performance Of Local Government Company In Tidore City (2018), Policy Implementation On Employee Performance Benefits Of Ternate Election Commission Secretariat (2019), Implementation of Standard Operational Procedures (SOP) Information Dissemination of BMKG Tsunami Early Warning at the Geophysical Statium of Ternate (2021).*

Dan Article Jurnal Nasional dan Internasional : *Social Empowerment Of Remote Indigenous Peoples : Study Of Villace Housing Program in Sula District North Maluku, Indonesia (2020), Implementation of Government Regulation Concerning Assignment of Teacher as School Principal (2020), The Effectiveness of Driving License Services in Police Station Traffic Unit (2020), Implementation of Government Regulation No. 53/2010 About Civil State Employees Discipline In General and Equipment of Regional Secretariat Halmahera (2020), The Effectiveness of e-ID Card Services in Sub-District City North Ternate (2021), Faktor Penyebab Konflik Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Halmahera Selatan (2019), Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pencegahan Minuman Keras Di Kota Tidore Kepulauan (Studi Di Kantor Kelurahan Gurabati Kecamatan Tidore Selatan) 2020, Peran Kepemimpinan Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai (studi di Kantor Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula) (2020), Implementasi Program Pemerintah Provinsi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Studi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara) (2020), Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Dob) Di Wilayah Provinsi Maluku Utara (2020), Kinerja Pemerintah Kelurahan Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Kelurahan Foramadiah Kecamatan Pulau Ternate ) (2020), Persepsi Politik Masyarakat Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Wasile Raya Di Kabupaten Halmahera Timur: Studi Desa Loleba Kecamatan Wasile Selatan (2020), Strategi Pengembangan Badan*

Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Perdesaan. (Studi di Desa Were Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah) (2021), Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Di Kabupaten Halmahera Selatan. (Studi Desa Saketa Kecamatan Gane Barat Tengah) (2021), Peran Pemerintah Daerah Dalam Keberlanjutan Penanganan Eceng Gondok Di Danau Duma Kabupaten Halmahera Utara (2022), Peran Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Dalam Percepatan Pembangunan Jalan Penghubung Antar Kelurahan (Studi di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tidore Kepulauan) (2022)

Semua Article yang telah di Publis Pada Jurnal Internasional terindex Scopus , Internasional dan Jurnal nasional tersebut dapat ditelusuri pada google scholar ID iUm3WEwAAAAJ, Sinta ID 6095030 dan Scopus ID 57205387443.

Buku Yang pernah di tulis : Epistemologi Pemerintahan, Paradigma Manajemen, Birokrasi, dan Kebijakan Publik, Penerbit : UMMU Press dan Gramasurya Yogyakarta 2019, Implementasi Kebijakan Presisi Kapolri Tentang Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, Penerbit : CV. Eureka Media Aksara Anggota IKAPI Tahun 2022, Efektifitas Penanganan Praktek Destructive Fishing Di Wilayah Maluku Utara, Penerbit : CV. Eureka Media Aksara Anggota IKAPI Tahun 2022 Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 50 Tahun 2016 di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ternate, Penerbit : CV. Eureka Media Aksara Anggota IKAPI Tahun 2022, Efektifitas Koordinasi Antar Stake Holder Dalam Penanggulangan Bencana Di Provinsi Maluku Utara, , Penerbit : CV. Eureka Media Aksara Anggota IKAPI Tahun 2022. Sebagai Kontributor Penulis pada Buku Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi Melalui Program Detasering, Catatan Pengalaman Detaser di Masa Pandemi Covid-19, Penerbit Insan Cendekia Mandiri 2021.

Sebagai Penyunting Buku : Ternate Bandar Jalur Sutera, Lintas (2001), Negara Hukum dan Good Governance, Ummu Press 2010, Anomali Pendidikan, Kebijakan, Problem & Realita, Ummu Press 2011, Empat Kuliah Hukum Tata Negara (Staadslehre In Ruimere Zin), Ummu Press 2014.

**Abdullah Kaunar, S.IP., M.A.**



**Abdullah Kaunar, S.IP., M.A.** lahir di Ternate 1 Juli 1982 adalah dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhamamadiyah Maluku Utara sejak 2005. S1 diselesaikan di Universitas Muhamamadiyah Malang (2004) dan S2 diselesaikan di UGM Yogyakarta (2011) dengan konsentrasi kajian Parpol dan Pemilu.

## Ali Lating M.A.



**Ali Lating M.A.** Lahir di Negeri Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. 13 Juni 1972. Menamatkan jenjang Pendidikan Dasar di SD Negeri II Hila - Kaitetu pada tahun 1986, SLTP. Hila- Kaitetu Tahun 1989, dan SMU Hila- Kaitetu Tahun 1992. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 1989. Pada Tahun 2005 diterima sebagai Dosen Kopertis kini LLDikti Wilayah XII dan ditempatkan di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Pada Tahun 2009 melanjutkan program magister di Jurusan Politik Pemerintahan ( JPP) di Universitas Gadjah Mada ( UGM ) Yogyakarta dan selesai pada tahun 2011.

Bersinergi dengan sejumlah akademisi, stakeholder dan lembaga Publik maupun LSM di Maluku Utara untuk sejumlah kegiatan antara lain : Tim Asistensi Penyusunan Standar Operasional Prosedur Unit Pengaduan RSU Hasan Boesir dan RSU Jailolo Halmahera Barat 2017. Tim Seleksi PANWAS Kabupaten /Kota Provinsi Maluku Utara 2017. Asesor BAN S/M. Provinsi Maluku 2018- 2020. Pengurus Wilayah Maluku Utara Dosen Muslim Indonesia periode 2018-2023. Direktur Development Legislative And Government Responsiviness (DE' Leger) Maluku Utara. Kepala Bidang Pemuda Dan Pendidikan Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) Maluku Utara Periode pertama 2020-2022 dan periode kedua 2022-2024. Tim penyusunan materi debat kandidat tahap I Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020. Tim Asistensi DPRD Kota Ternate Dalam Pembahasan Rancangan Awal RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026.

Peneliti Tamu “ Teacher Absenteeism –ACDP11 Di Wilayah Propinsi Maluku Utara Dan Maluku Lembaga Penelitian SMERU 2013. Poverty Assessment North Mollucas (CEFORDES UMMU) 2014. Survey Logistik Maluku Utara Kerja Sama BALITBANGDA Propinsi Maluku Utara dan LP2M UMMU 2015. Riset Potensi Terorisme di Propinsi Maluku Utara Kerja sama BNPT Tahun 2015. Riset Dinamika Politik Pemilu Legislatif Kerja sama dengan Jurusan Politik Pemerintahan UGM dan Australian National University (ANU). Tahun 2014. Riset Nasional Partai Politik Di Indonesia Kerja sama dengan Center Strategic And International Studies ( CSIS) Tahun 2015. Riset Politik Lokal (Studi Rekrutmen Elit Strategis, Pengelolaan Sumber Daya, Dan Pengelolaan Konflik . Hila, Leihitu, Maluku Tengah, (2018). Tahun 2018 -2019 . Terlibat dalam Akreditasi sejumlah satuan pendidikan di wilayah Provinsi Maluku Utara. Antara lain Halmahera Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Halmahera Timur dan Halmahera Selatan. Riset Penguatan Kebhinekaan Dan Literasi Digital Dalam Upaya Menangkal Radikalisme Melalui BNPT/FKPT Maluku Utara Tahun 2020. Riset Kemampuan Pemerintah Dalam Kebijakan Strategis. Covid -19 Dan Ancaman Keselamatan Warga Negara Studi Governability ( *Kapasitas Pemerintah*) Dalam Pengambilan Kebijakan Strategis Di Provinsi Maluku Utara. 2020. Riset Tawaf dan Sigafu Gam Cara Masyarakat Adat Kesultanan Ternate Berdamai Dengan Covid-19. 2021 Riset Politik Lokal ( Pengelolaan Budaya dan Sumber Daya Alam) Kampung Mello, Labuan Bajo Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur Tahun 2021. Riset Politik Lokal Kearifan Budaya Lokal “Damai” Tradisi Pengelolaan Lingkungan dan Keselamatan Warga Desa Maitara Utara Tahun 2021.

Penghargaan : Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun Pengabdian, menerbitkan sejumlah Buku : Indonesia Di Perbatasan Dan Kepulauan. Terbit Tahun 2014, Problematika Dan Isu Politik Lokal Maluku Utara Edisi Revisi 2021, Covid 19 Dan Governability Edisi Revisi 2021 Jelajah Pulau Maitara (*Editor*) 2021, Kearifan Budaya Lokal Indonesia Timur. 2021 Karya Bersama. Konflik Perebutan Ruang Hidup( *Suatu Pendekatan Kebijakan Dan Konsensus*) 2021.

**Bakri La Suhu, S.IP., M.A.**



**Bakri La Suhu, S.IP., M.A.** Lahir di Pulau Obi khususnya Desa Mano Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 14 Mei 1985. Menempuh pendidikan tinggi Strata Satu (S-1) pada Jurusan Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (2004-2008) dan melanjutkan Program Magister (S-2) Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta (2010-2011). Penulis merupakan Dosen pada Program Studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara sejak tahun 2012 hingga sekarang dan sejak tahun 2018 hingga sekarang juga menjabat sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Program Pascasarjana (PPs) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara.

**Dr. H. Iksan R.A. Arsad, M.Si.**



**Dr. H. Iksan R.A. Arsad, M.Si.**

dilahirkan di Soasio Galela Halmahera Utara pada 04 Nopember 1970. Pendidikan SD, MTs Muhammadiyah dan SMA di Galela, Halmahera Utara. Selanjutnya menyelesaikan pendidikan pada APDN Ambon pada 1991, S1 Ilmu Politik pada Institut Ilmu Pemerintahan DDN Jakarta tahun 1996, S2 Ilmu-Ilmu

Sosial Bidang Kajian Utama (BKU) Ilmu Pemerintahan di Univ, Padjadjaran tahun 2000 dan selama 3,5 tahun menyelesaikan Program Doktorat Ilmu Politik pada FISIP Universitas Indonesia tahun 2016. Bekerja di pemerintahan daerah mulai dari staf Kantor Kecamatan Tidore, Kab. Halmahera Tengah 1992-1993, Staf pada Biro Kepegawaian dan Biro Umum SETDA Provinsi Maluku di Ambon 1994-2002, Biro Infokom SETDA Provinsi Maluku Utara 2002-2009, Dinas Perhubungan dan Kominfo Provinsi Malut 2009-2017, Dinas Kominfo dan Persandian Provinsi Malut 2017- sekarang (menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas sejak 2019). Sejak 2003 menjadi staf pengajar di FISIP UMMU Ternate dan sejak 2020 menjadi staf pengajar pada Pasca Sarjana Ilmu Administrasi UMMU Ternate. Aktif melakukan penelitian di bidang ilmu politik dan pemerintahan serta menjadi presenter pada National and International Conference Political Science.

**Rahmat Suaib, S.IP., M.IP.**



**Rahmat Suaib, S.IP., M.IP.** Lahir di Dokulamo Kecamatan Galela pada tanggal 12 Februari 1981, Menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (2005), dan Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan Pada Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan (M.IP) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2014). Penulis merupakan Dosen tetap Program Studi Ilmu Pemerintahan, saat ini menjabat sebagai Koordinator Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara.

## **Rasyid Pora, S.IP., M.IP.**



**Rasyid Pora, S.IP.,M.IP.** lahir di Desa Orifola Kec. Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara tanggal 12 Mei 1982. Ia adalah dosen aktif di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU). Ia telah menyelesaikan

pendidikan S1 di program studi ilmu pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Tamat (2007), dan S2 di Jurusan Magister Ilmu Pemerintahan (M.IP)/ Master of Government Affair and Administration (MGAA) Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2014), Sekarang ia sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Priode 2022-2026

**Sahrul Pora, S.IP., M.IP.**



**Sahrul Pora, S.IP., M.IP.** dilahirkan di Sanana (Desa Orifola Kec. Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, pada tanggal 28 Februari 1996, menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Tahun 2017 dan S2 di Jurusan Magister Ilmu Pemerintahan (M.IP) Program Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan lulus Tahun 2021, Kini sebagai asisten dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara

**Syarifuddin Usman, S.IP., M.IP.**



**Syarifuddin Usman, S.IP., M.IP.** lahir di Tobelo 21 November, sejak 2018 diangkat menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara program studi Ilmu Pemerintahan FISIP. Sebelum menjadi dosen, pernah menjadi wartawan Ternate Post (2000-2006), kemudian menjadi orang kontrakan di LSM GOCEFA selama 4 (empat) tahun (2006-2010) dan dipercaya menjadi Manager Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan (LEAD) kerjasama UNDP dan BAPPENAS. Banyak melakukan survey dan riset. Pengalaman luar negeri yang pernah diikuti adalah Mengikuti Seminar *Researching Women and Society*, yang diselenggarakan oleh *Women's Development Research Centre* (KANITA) University Sains Malaysia (USM) bekerjasama dengan Southeast Asian Association for Gender Studies Malaysia Branch (SAMA), Penang, (2013) Saat mahasiswa, menjadi aktivis HMI Cabang Ambon (1994-1995) dan Badko HMI Malirja (1999-2000). Saat ini menjadi pengurus sejumlah organisasi, Majelis Wilayah KAHMI Maluku Utara (2021-2026), Pengurus Majelis Pengurus Wilayah ICMI ORWII Maluku Utara (2021-2026), Menjadi aktivis lingkungan di Komunitas Eco Enzyme. Sering menulis opini di media lokal dan online. Penulis bisa dihubungi melalui email [syarifusman149@gmail.com](mailto:syarifusman149@gmail.com)

**Vivi Noviyanti, S.IP., M.Si.**



**Vivi Noviyanti, S.IP., M.Si.** kelahiran 27 April 1988 di Palangkaraya-Kalimantan Tengah, menyelesaikan SD,SMP dan SMU di Palangkaraya. Kuliah S1 di IPDN Jatinangor konsentrasi Manajemen Pembangunan selesai tahun 2009 dan S2 Magister Administrasi Pemerintahan Daerah di Universitas yang sama, dan selesai tahun 2012. Kemudian menyelesaikan S2 Magister Ilmu Administrasi di UMMU Ternate, selesai tahun 2020. Sebelum menjadi dosen Ilmu pemerintahan FISIP di Universitas Muhamadiyah Maluku Utara, Vivi pernah menjadi CPNS Depdagri Kalimantan Tengah. Saat ini bermukim di Kota Ternate dan dosen di Universitas Muhamadiyah Maluku Utara Program Studi Ilmu Pemerintahan.